

**PERAN NAHDLATUL ULAMA (NU)
DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
PADA PEMILU 1999 DI KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Melengkapi Gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh:

SITI KHOMSATUN
C0501056

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN

PERAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILU 1999 DI KABUPATEN KLATEN

Disusun oleh

**SITI KHOMSATUN
C0501056**

Telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

Drs. Sudarno, M.A.

NIP. 19530314 198506 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum

NIP. 19540223 198601 2 001

PENGESAHAN

**PERAN NAHDLATUL ULAMA (NU)
DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
PADA PEMILU 1999 DI KABUPATEN KLATEN**

Disusun oleh
SITI KHOMSATUN
C0501056

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Pada Tanggal 24 Maret 2010

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	<u>Dra. Sri Wahyuningsih, M. Hum</u> NIP. 19540223 198601 2 001
Sekretaris	<u>Dra. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd.</u> NIP. 19580601 198601 2 001
Penguji I	<u>Drs. Sudarno, MA.</u> NIP. 19530314 198506 1 001
Penguji II	<u>Tiwuk Kusuma Hastuti, SS., M.Hum.</u> NIP. 19730613 200003 2 002

Dekan
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Drs. Sudarno, M.A
NIP.19530314 198506 1 001

PERNYATAAN

A. Nama : SITI KHOMSATUN
NIM : C0501056

B.
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten* adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini di beri tanda *citasi* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

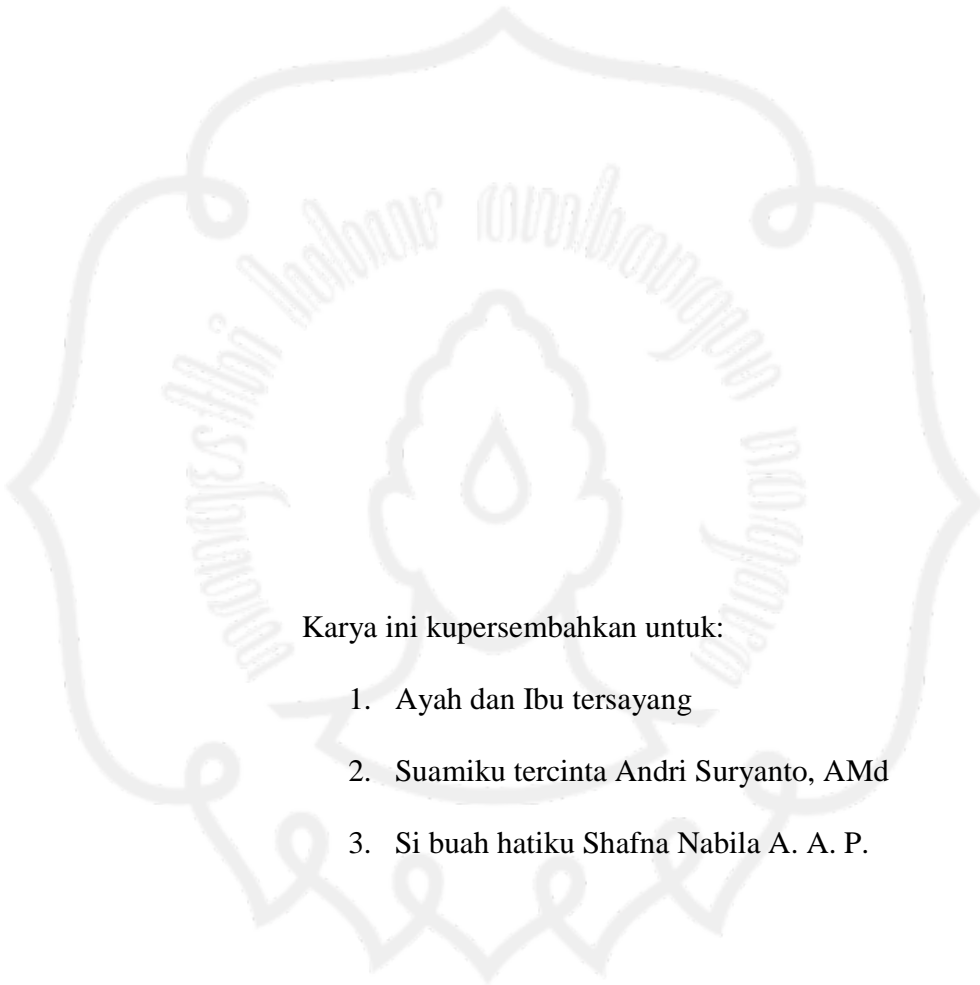
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, 30 Maret 2010

Yang membuat pernyataan

Siti Khomsatun

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tersayang
2. Suamiku tercinta Andri Suryanto, AMd
3. Si buah hatiku Shafna Nabila A. A. P.

C. KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Alloh SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten ini merupakan suatu studi tentang perilaku politik masyarakat Nahdliyin di Kabupaten Klaten yang lebih menitikberatkan pada peranan kiai NU. Studi ini dilakukan sebagai respon atas kesuksesan PKB pada Pemilu 1999 di Klaten. PKB sebagai partai baru mampu meraih suara terbesar keempat setelah PDIP, PAN dan Partai Golkar. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada dan dapat memacu munculnya karya-karya baru mengenai dinamika sosial politik masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia.

Skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan mencurahkan perhatian atas terselesainya penulisan skripsi ini, baik berupa bimbingan, dorongan, motivasi dan berbagai bantuan lainnya. Pada kesempatan ini sepantasnya saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut ini ;

Kepada Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS Drs. Sudarno, MA, Ketua Jurusan Ilmu Sejarah FSSR UNS Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Drs. Sudarno,

M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sampai terselesainya penulisan skripsi ini. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Sejarah FSSR UNS yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih, serta kepada Pembimbing Akademis Drs. Suhardi, MA yang senantiasa membantu dan mengarahkan dalam keakademisan.

Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten cq. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Klaten, yang telah berkenan memberikan data-data berkaitan dengan penelitian ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten yang juga telah memberikan pinjaman data tentang laporan penyelenggaraan Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten. Kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Klaten, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Klaten. Serta para nara sumber yang bersedia menyisihkan waktu untuk dimintai informasi dan fakta pada tahun 1999.

Kepada Monumen Pers Surakarta yang telah membantu dalam mencari dan memperoleh arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini, UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, yang telah berkenan meminjamkan sumber-sumber arsip dan buku-bukunya.

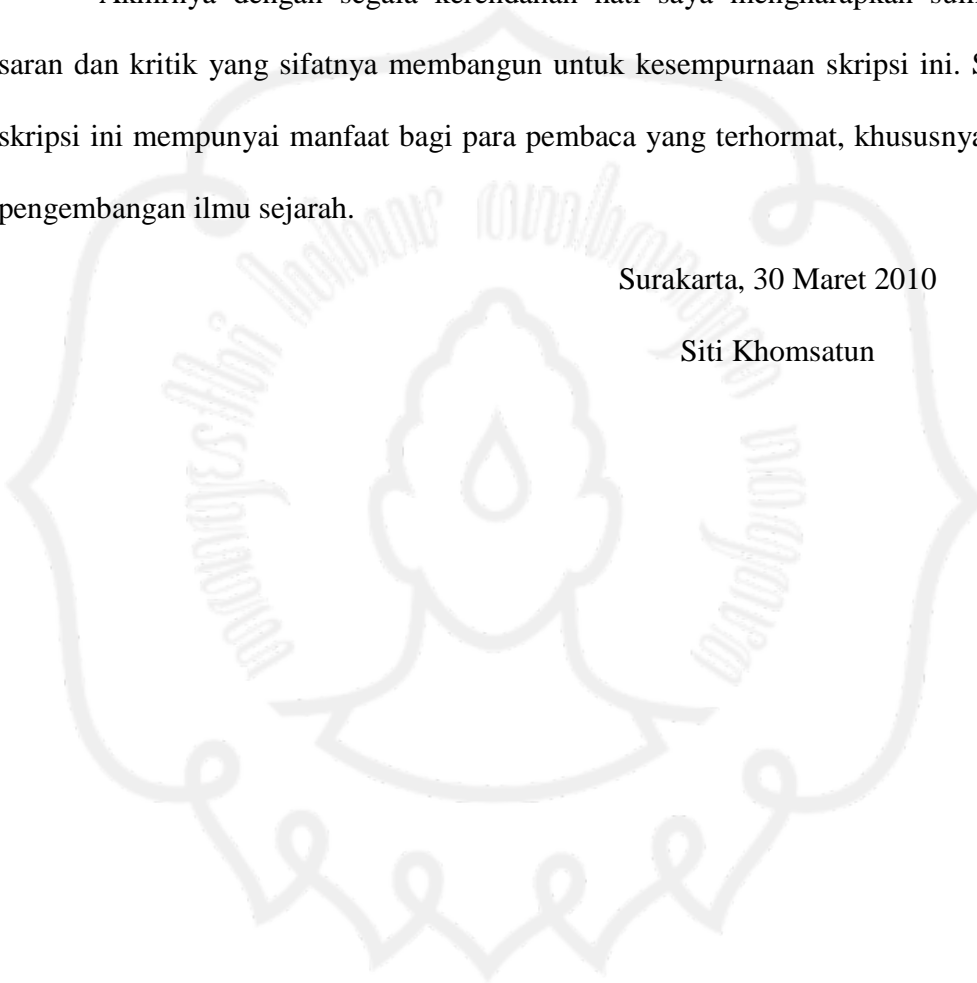
Kepada suami tercinta Andri Suryanto, A.Md yang selalu memberikan do'a, motivasi, cinta dan kesetiaannya selama ini. Buah hatiku Shafna yang menjadi cambuk semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Ayah dan Ibu tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dorongannya. Kepada kakak-kakakku Mas Syamsul, mbak Iyah, mbak Nur, Mas Udin beserta keluarganya, buat Syafiq *family* terimakasih atas pinjaman *laptopnya*. Buat seluruh keluarga mertuaku Bp. Suwanto,

juga kepada segenap keluarga dan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semua bantuannya baik berupa moril maupun spirituil. Serta kepada teman-teman Jurusan Sejarah FSSR UNS angkatan 2001 yang bersedia menjadi teman diskusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan sumbangan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi para pembaca yang terhormat, khususnya dalam pengembangan ilmu sejarah.

Surakarta, 30 Maret 2010

Siti Khomsatun



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II NAHDLATUL ULAMA (NU) DI KABUPATEN KLATEN	15
A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten.....	15
B. Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) di Klaten.....	18
C. NU Keluar dari PPP di Klaten	26
D. NU Klaten Menjelang Pemilu 1999.....	29
BAB III LAHIRNYA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KLATEN	33

A. Dinamika Partai Politik.....	33
B. Latar Belakang Lahirnya PKB.....	40
C. Peranan NU Dalam Membidani Lahirnya PKB.....	46
D. Garis Perjuangan dan Struktur Organisasi PKB	51
BAB IV PERANAN NU DALAM KESUKSESAN PKB PADA PEMILU 1999 DI KLATEN.....	56
A. Konflik Partai Dalam Tahapan Pemilu	58
B. Peranan Kiai Dalam Mobilisasi Massa	67
C. Konsolidasi NU-PKB.....	76
D. Hasil Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten.....	79
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94


DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di Parlemen berdasarkan Pemilu 1971
- Tabel 2 : Hasil Perolehan Kursi Empat Partai Besar berdasarkan Pemilu 1955
- Tabel 3 : Hasil Perolehan Kursi Partai berdasarkan Pemilu 1977
- Tabel 4 : Hasil Pantauan Tahapan Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten
- Tabel 5 : Perolehan suara lima besar partai di daerah konflik PAN dan PPP
- Tabel 6 : Perolehan Suara Kumulatif 5 Besar Partai Hasil Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten
- Tabel 7 : Perolehan suara 10 besar Partai pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten
- Tabel 8 : Pembagian Kursi dan Persentase Hasil Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilih
BPKNI	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Caleg	: Calon Anggota Legislatif
Dapil	: Daerah Pemilihan
DCT	: Daftar Caleg Tetap
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
GP	: Gerakan Pemuda
Golkar	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPNU	: Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
IPPNU	: Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
IPS Pagar Nusa	: Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa
ISNU	: Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama
JQH	: Jami'iyatul Qurro wal Huffadz
Kesbanglinmas	: Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum

Konfercab	: Konferensi Cabang
Konferwil	: Konferensi Wilayah
Lakpesdam	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
LBMNU	: Lajnah Bahtsul Masali Nahdlatul Ulama
LDNU	: Lembaga Dahwah Nahdlatul Ulama
LPBH	: Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum
LKKNU	: Lembaga Kemaslahatan Keluarega Nahdlatul Ulama
LPKNU	: Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama
LP Ma'arif NU	: Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama
LPNU	: Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama
LP2NU	: Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama
LTMI	: Lembaga Takmir Masjid Indonesia
Makodam	: Markas Komando Daerah Militer
Masyumi	: Majelis Syura Muslimin Indonesia
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MDI	: Majelis Dakwah Islamiyah
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia
MPR	: Dewan Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MWC	: Majelis Wakil Cabang
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama.
Orba	: Orde Baru



Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial Politik
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
Parpol	: Partai Politik
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
PCNU	: Pimpinan Cabang Nabdlatul Ulama
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PI	: Indische Partaij
PIR	: Partai Indonesia Raya
PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKU	: Partai Kebangkitan Umat
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNU	: Partai Nahdlatul Ummat
Ponpes	: Pondok Pesantren
PP	: Peraturan Pemerintah



PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PR	: Pimpinan Ranting
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia ()
PWNU	: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
RMI	: Rabithah Ma'ahid Islamiyah
RSI	: Rumah Sakit Islam
Satgas	: Satuan Tugas Sarbumusi : Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
Sekber	: Sekretaris Bersama
SDM	: Sumber Daya Manusia
Susduk	: Susunan dan Kedudukan
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1	: Surat Keputusan DPP PKB tentang Susunan DPC PKB Kabupaten Klaten.....	94
Lampiran-2	: Daftar surat keputusan DPC PKB Klaten tentang susunan PAC dan Pengurus Ranting PKB.....	96
Lampiran-3	: Rencana pembagian tugas pembinaan kewilayahan PC Nahdlatul Ulama Klaten.....	101
Lampiran-4	: Instruksi DPC PKB kepada segenap warga dan simpatisan PKB se-Kabupaten Klaten agar <i>colling down</i>	102
Lampiran-5	: Himbauan DPC PKB menjelang Pemcoblosan	103
Lampiran-6	: Keputusan KPU Nomor 05/1999 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 1999	104
Lampiran-7	: Sertifikasi tabulasi hasil penghitungan suara PPD II.....	110
Lampiran-8	: Daftar anggota PPD II Kabupaten Klaten.....	112
Lampiran-9	: Profil singkat PKB	114
Lampiran-10	: Peraturan KPU Nomor 76.A/1999 tentang Tata Cara Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.....	116
Lampiran-11	: Surat PW NU Jawa Tengah tentang amaliyah menjelang Pemilu 1999.....	126
Lampiran-12	: Surat Instruksi PB NU tentang amaliyah menjelang Pemilu Juni 1999.....	127
Lampiran-13	: Daftar pondok pesantren NU di Kabupaten Klaten	129
Lampiran-14	: Berita dan foto yang diterbitkan dalam <i>Harian Bernas</i> dan <i>Harian Kompas</i> pada Mei dan Juni 1999.....	130
Lampiran-15	: Daftar Istilah	136
Lampiran-16	: Daftar Nara Sumber	142

ABSTRAK

Siti Khomsatun. C0501056. 2008. *Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten.* Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah (1) Bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Klaten? (2) Bagaimana sejarah berdirinya PKB di Kabupaten Klaten? (3) Bagaimana peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung kesuksesan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten?

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1) Untuk mengetahui sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Klaten. (2) Untuk mengetahui sejarah berdirinya PKB di Kabupaten Klaten. (3) Untuk peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung kesuksesan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan menggunakan metode sejarah dalam proses pencarian dan analisis data. Metode sejarah adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (lisan maupun tulisan) dan merekonstruksi secara imajinatif masa lalu tersebut berdasarkan data yang diperoleh. Metode sejarah meliputi empat tahap yaitu *heuristik*, usaha mencari dan menemukan data sejarah; kritik sumber, untuk mencari otentisitas atau keaslian sumber yang diperoleh melalui kritik ekstern dan intern *interpretasi* atau membangun fakta melalui data atau sumber sejarah yang telah diperoleh dan *historiografi*. Pendekatan yang dipakai adalah *multidimensional approach*, yakni pendekatan ilmu sosial, politik dan budaya untuk mengkaji peranan NU dalam kemenangan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, pendirian Nahdlatul Ulama (NU) di Klaten yang dimotori para kiai pesantren pada awalnya memang memiliki semangat berpolitik yang memadai untuk menjadikan NU sebagai wadah berpolitik satu-satunya bagi warga Nahdliyin. Demikian juga lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Klaten tidak bisa lepas dari peranan kiai pesantren, karena basis kedua organisasi tersebut berawal dari pesantren. Pola kaderisasi dalam penggalangan massa untuk mencapai tujuan politik PKB pada Pemilu 1999 sedikit banyak dibantu oleh para kiai dari NU. Bisa dikatakan bahwa antara PKB dan NU ini ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang. Gerakan politik yang dilakukan sejumlah kiai NU untuk menyukseskan PKB sifatnya tradisional dan konservatif, dalam hal ini mereka memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian kampung atau desa. Walaupun begitu PKB Klaten mampu meraih peringkat keempat setelah PDIP, PAN, dan Golkar dalam perolehan suaranya. Warga NU di Klaten yang menggunakan aspirasinya ke Partai selain PKB karena memang dari NU tidak memaksakan kehendak. NU lebih memilih memberikan kebebasan dalam beraspirasi agar sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Hal tersebut yang mampu mendukung PKB sukses dalam Pemilu 1999. Kesuksesan tersebut antara lain: PKB Klaten sama sekali tidak terlibat konflik, kemudian pada saat kampanye PKB Klaten

tidak melakukan pelanggaran dan kecurangan, Serta PKB sebagai Partai baru pada Pemilu 1999 di Klaten memperoleh peringkat suara urutan keempat, lebih banyak dari PPP dan Partai NU lainnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan kiai dalam kehidupan masyarakat tradisional Jawa cukup kental dan memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat tradisional setempat terhadap afiliasi politik. Sikap yang diambil seorang kiai yang notabene sebagai seorang tokoh 'karismatik' secara otomatis akan menjadi patokan bagi masyarakat dalam bertindak dan bersikap. Sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari suatu keluarga yang berpengaruh, kiai merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. Kiai menduduki posisi sentral dalam masyarakat pedesaan dan mampu mendorong rakyat untuk bertindak secara kolektif.¹

Kiai merupakan sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam.² Beberapa istilah seperti *bindere*, *nun*, *ajengan* dan *guru* merupakan sebutan yang semula diperuntukan bagi para ulama tradisional di Jawa dan di luar Jawa ini bisa disejajarkan dengan istilah kiai. Menurut Manfred Ziemek, penghormatan yang tinggi terhadap kiai ini juga sebagai hasil atas integritas para kiai terhadap godaan-godaan yang bermotif kepentingan diri untuk melakukan *oportunisme* politik. Dengan kedudukan tersebut peranan kiai tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan,

¹ Ali Maschan Moesa, 1999, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : Lepkiss, hlm 60.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 565.

melainkan juga merambah pada bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan lainnya.³ Peranan kiai dalam bidang politik ini bisa dilihat dalam perjalanan sejarah bangsa ini di zaman kolonial, hingga sampai membentuk suatu wadah organisasi massa berbasis agama yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama (NU). Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang perkembangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik, sejak awal munculnya demokrasi dalam tata pemerintahan Indonesia pascakemerdekaan. NU didirikan oleh para kiai (ulama) pengasuh pondok pesantren (Ponpes) pada 31 Januari 1926 M atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Pendirian NU tersebut sebagai implementasi dari perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam para kiai Sunni. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan tentunya tidak meninggalkan tradisi keilmuan para kiai sebelumnya. Pada awal berdirinya NU, secara murni bukan merupakan organisasi politik, bahkan tidak berafiliasi sama sekali terhadap partai politik (Parpol) tertentu. Tetapi pada perkembangan berikutnya, NU pernah bergabung dengan Parpol tertentu dan pernah menjadi organisasi politik menjelang Pemilu 1955.⁴

Sejak Muktamar ke-19 NU di Palembang pada tahun 1952, para kiai mendeklarasikan NU sebagai Parpol yang berdiri sendiri, setelah sebelumnya bergabung dengan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun, NU mampu muncul sebagai kekuatan politik yang cukup besar di Indonesia dengan menduduki peringkat ketiga setelah PNI (Partai

³ Ali Maschan Moesa, *op. cit.* hlm 3.

⁴ *Ibid*

Nasional Indonesia) dan Masyumi pada Pemilu 1955. Pada masa ini kiai NU masih menempati posisi yang strategis dalam lembaga pemerintahan dan legislatif.⁵ Kedudukan NU sebagai Parpol ini tampaknya tidak mampu bertahan sampai dua dasawarsa. Parpol bentukan para kiai pesantren ini hanya mampu sampai pelaksanaan Pemilu pada tahun 1971. Sejak tahun 1973, Partai NU tidak lagi diakui sebagai Parpol yang berdiri sendiri dan dipaksa melebur menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga tahun 1984. Pada masa peleburan ini para kiai NU merasa dipinggirkan dari kancah perpolitikan nasional pada pemerintahan Orde Baru, bahkan banyak para tokoh NU yang dijebloskan ke penjara dengan macam-macam tuduhan.⁶

Ada perubahan orientasi politik para kiai NU pada tahun 1984, melalui Mukhtar ke-27 NU di Situbondo, para kiai NU sepakat untuk kembali ke *khittah* 1926. NU menyatakan diri keluar dari pergulatan politik praktis dan kembali ke jati dirinya semula sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*). Pasca-Mukhtar NU di Situbondo, NU memosisikan diri sebagai organisasi sosial keagamaan dengan menghidupkan kembali bidang-bidang kegiatan dakwah kemasyarakatan. NU mulai menata pendidikan mulai pendirian sekolah, rumah sakit yang telah lama terabaikan.⁷

Dalam perkembangan tahun-tahun menjelang reformasi 1998, NU merupakan salah satu kelompok sosial keagamaan yang mempunyai peranan penting dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam, NU bukan hanya merupakan sebuah komunitas religius, tetapi juga komunitas politik,

⁵ *Ibid*, hlm 18-20.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm 21.

mengingat basis sosialnya yang sangat besar. Oleh karenanya, keterlibatannya dalam kancah perpolitikan nasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan pada gilirannya membuat peran organisasi kaum Nahdliyin ini cukup kental dengan nuansa sosial politik. Jika ditilik dari historis politiknya, pengalaman NU dalam gerakan politik tidak hanya terkait dengan logika kepentingan politik kelompoknya, tetapi juga masuk pada wilayah perdebatan tentang hubungan Islam dan Negara. Perdebatan itu pada akhirnya juga akan mengarah pada diskursus tentang format gerakan politik Islam yang ideal dan strategis dalam konteks kebangsaan Indonesia. Gerakan inilah yang kemudian disebut sebagai gerakan Islam politik, karena mencoba membawa Islam masuk dalam pertarungan politik. Dalam konteks ini NU masuk menjadi arus gerakan politik yang berlandaskan ajaran dan nilai-nilai Islam.⁸

Tumbangnya Pemerintahan Orde baru (Orba) telah membuka kran politik yang sebelumnya tertutup dan merupakan peluang bagi pembaharuan sistem politik Indonesia. Salah satu yang menjadi tuntutan reformasi kepartaian dan Pemilu Indonesia diarahkan untuk semata-mata bertujuan mempertahankan legitimasi Orba, ketimbang menawarkan visi maupun komposisi pemerintah alternatif. Partai peserta pemilihan umum (Pemilu) ketika itu selalu diimbau bahwa Pemilu bukan merupakan forum untuk menggelar kontes politik. Dengan demikian keberadaan partai selain Golkar hanya formalisme demokrasi, di mana Golkar harus tetap menjadi pemenang mutlak.⁹

⁸ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU; Eksperimen Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan pascakembali ke Khittah 1926*, Jakarta : Pustaka Ciganjur, 2002, hlm 261.

⁹ *Ibid*

Akibat kekecewaan terhadap politik penguasa dan ingin menunjukkan perannya dalam perpolitikan Indonesia, maka sejumlah kiai langitan NU mulai membentuk partai baru. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satu nama yang dipilih untuk membawakan aspirasi jamaah Nahdliyin. PKB adalah partai politik yang lahir dan dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam konteks penamaan PKB kata “kebangkitan” diambil dari bahasa Arab *Nahdlah* yang merujuk pada penggunaan kata dalam Nahdlatul Ulama (NU). Alasan peng-Indonesiaan kata *nahdlah* dalam PKB yang tidak seperti dalam NU, tampaknya agar PKB lebih familiar dengan rakyat dan agar tidak membawa symbol-simbol Arab (Islam) dalam praktek politik. Sementara penggunaan kata “bangsa”, bukan umat misalnya, karena warga NU sangat mencintai bangsa ini. Dan kata “bangsa” itu sendiri telah masuk dalam lubuk hati warga NU. Apalagi kita sebagai bangsa terdiri dari orang-orang yang beragam, ada yang Islam, ada pula yang bukan Islam. Jadi kalau kita menggunakan kata “bangsa” berarti akan mencakup semua warga masyarakat Indonesia.¹⁰

PKB didirikan oleh tokoh-tokoh dan masyarakat NU serta diresmikan, diresmikan dan dideklarasikan oleh Pengurus Besar NU (PBNU). Dapat dikatakan bahwa PBNU-lah yang membidani dan mendirikan PKB, sebab semua proses dan perumusan menjelang kelahiran PKB dihasilkan dari tim yang dibentuk dan disahkan oleh PBNU. Dari sisi ini memang dapat dikatakan bahwa PKB merupakan partainya warga NU, meskipun konstruksi organisasinya terbuka diperuntukan bagi seluruh

¹⁰ KH Abdurrahman Wahid, sambutan yang disampaikan dalam Deklarasi PKB tanggal 23 Juli 1998, dalam *Warta NU*, Edisi Agustus 1998, hlm 18.

rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sebagai salah satu pendatang baru (Usia sekitar 8 bulan) di antara partai peserta Pemilu 1999, PKB sebagai partai baru merasa mempunyai peluang untuk menang dalam Pemilu. Keyakinan ini muncul karena PKB merupakan cerminanan politik NU yang mempunyai basis politik yang kuat. Berdasar dari latar belakang di atas penelitian ini mengambil judul “Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan berikut yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini;

1. Bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana sejarah berdirinya PKB di Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung kesuksesan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui sejarah berdirinya PKB di Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui peran Nahdlatul Ulama dalam mendukung kesuksesan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai peranan NU dalam mendukung kemenangan PKB sebagai partai baru bentukan kiai pada proses Pemilu 1999. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori-teori sejarah yang ada.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, selain sebagai bahan rujukan atau referensi dalam kajian mengenai hubungan Islam dan Negara, penelitian ini juga dapat menambah khasanah sejarah lokal, terutama kajian sejarah sosial politik di Kabupaten Klaten.

E. Kajian Pustaka

A.Affendy Choirie dalam bukunya yang berjudul *PKB Politik Jalan Tengah NU*, 2002, menjelaskan bahwa terjadinya pergeseran-pergeseran pemikiran dan gerakan politik NU pada momentum-momentum historis tertentu menyebabkan lahirnya PKB. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang dinamika politik NU dari sejak lahirnya NU sampai pada Pemilu 1999.

Hussein Syifa dalam makalahnya "*Menggagas Model berpolitik NU yang Relevan Bagi Masa Depan Santri*", 2004 membahas tentang kecenderungan partisipasi dan kecenderungan parokial warga NU dalam memberikan hak suara.

Syifa menjelaskan bahwa santri-santri dituntut untuk sadar akan masa depan diri dan bangsanya. Jadi jika para santri memiliki aspirasi politik, maka harus menggunakan hak suaranya dalam memilih sesuai hati nurani masing-masing.

Zamarkhsyari Dhofier¹¹ menjelaskan bahwa perkumpulan NU seperti yang dikenal sekarang ini adalah pewaris dan penerus tradisi kiai. NU telah mampu mengembangkan suatu organisasi yang stabilitasnya sangat mengagumkan, walaupun ia sering menghadapi tantangan-tantangan dari luar yang cukup berat. Modal utamanya adalah karena para kiai memiliki sesuatu perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (*highly developed social sensei*) dan selalu menghormati tradisi. Rahasia keberhasilan kiai dalam mengembangkan sistem organisasi mereka bahwa struktur sosial yang mana pun haruslah mempercayai *general consensus*, bukannya mempercayakan atau menggantungkan persetujuan yang dilaksanakan atau sistem organisasi yang rumit.

Kevin R Evans¹² dalam bukunya mengatakan, pintu masuk era reformasi menuju negara yang demokratis adalah dengan cara memperbaharui undang-undang Pemilu, sistem kepartaian, serta susunan dan kedudukan (Susduk) DPR-MPR. Di samping itu dalam sistem Pemilu 1999 yang baru, pemilih diberi kebebasan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam pendaftaran. Dengan pola ini proses pendaftaran diubah menjadi sesuatu yang bersifat sukarela.

¹¹ Dhofier, 1983, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES.

¹² Evans, 2000, *Sistem Baru, Suasana Baru Pemilu 1999 yang Dinanti Dalam Almanak Parpol Indonesia : Pemilu 1999*, Jakarta : API

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian historis dengan menggunakan metode sejarah dalam proses pencarian dan analisis data. Menurut Sartono metode sejarah adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (lisan maupun tulisan) dan merekonstruksi secara imajinatif masa lalu tersebut berdasarkan data yang diperoleh. Hal itu oleh Sartono disebut dengan historiografi. Pendapat lain mengatakan bahwa metode sejarah adalah proses mengumpulkan, menguji, dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lampau serta usaha melakukan sintesa terhadap data masa lampau tersebut menjadi kisah sejarah.¹³

Metode sejarah meliputi empat tahap, yang pertama yaitu *heuristik*, yakni usaha mencari dan menemukan data sejarah; yang kedua *kritik sumber*, kritik ini bertujuan untuk mencari otentisitas atau keaslian sumber yang diperoleh melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber melalui bentuk fisik sumber tersebut, sementara kritik intern bertujuan untuk mengetahui tingkat otentisitas data yang terkandung dalam sumber tertulis atau menguji kredibilitas sumber. Tahap ketiga adalah *interpretasi* atau membangun fakta melalui data atau sumber sejarah yang telah diperoleh. Tahap terakhir atau keempat adalah *historiografi*, dalam penulisan sejarah ini diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai kejadian yang ada dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya, atau dengan menganalisis secara

¹³ Sartono Kartodirjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 2

mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari sejarah yang dikaji.¹⁴

Pendekatan yang dipakai adalah *multidimensional*¹⁵ yang dapat digunakan untuk meneropong segi-segi sosial dan budaya permasalahan yang dikaji, dalam hal ini adalah peranan NU dalam menyukseskan PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten. Selain itu pendekatan politik juga digunakan, yaitu untuk menganalisa kepentingan politik NU dalam Pemilu 1999, di mana pembentukan PKB itu merupakan rentetan struktural partai di tingkat nasional.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi sebanyak 26 kecamatan di Kabupaten Klaten pada masa Pemilu 1999. Kendati demikian, penelitian ini hanya mengambil beberapa sample daerah yang menjadi basis massa NU dalam mensukseskan PKB pada masa Pemilu 1999, yakni di Kecamatan Ceper, Karangnongko, Karanganom, Ngawen, Manisrenggo, Kemalang, Trucuk dan Juwiring. Sejumlah kecamatan tersebut memiliki basis massa dari NU cukup besar.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, baik yang bersifat lisan maupun tulisan, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat, dalam wawancara seorang peneliti harus dapat melakukan tiga tahapan agar wawancara tersebut berjalan lancar. Tiga tahapan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid, hlm 3*

tersebut adalah (1) penyeleksian individu untuk diwawancarai. (2) pendekatan dengan orang yang telah diseleksi dan (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai. Dalam rangka penelitian masyarakat, terdapat dua cara wawancara, yaitu wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan wawancara untuk mendapatkan keterangan mengenai diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang diwawancarai untuk keperluan komparatif.¹⁶ Untuk keperluan pembuktian dan kejelasan dari individu yang memberi keterangan maka dilakukan observasi ke daerah-daerah yang merupakan basis massa pendukung PKB. Dalam observasi tersebut yang berhasil diwawancarai ada 6 (enam) orang, yaitu: Drs. Syamsuddin, M.Hum (Ketua PCNU Klaten), Drs. Bambang Suprobo (Ketua DPC PKB Klaten), M. Sadzili AR (Sekretaris DPC PKB Klaten), KH. Mustamari (anggota dewan Syuro DPC PKB Klaten), Walidi, BA (Ketua MWC NU Juwiring), KH. Ida Royani (Ketua MWC NU Tulung).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dimaksud adalah mengumpulkan data dengan memanfaatkan arsip dan dokumen yang tersimpan di kantor arsip, baik di tingkat daerah, maupun di tingkat nasional. Arsip adalah himpunan bahan tertulis yang disusun secara sistematis dan sewaktu-waktu dapat digunakan dalam administrasi,

¹⁶ Koentjaraningrat, 1983, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, hlm 129-130.

sedangkan dokumen adalah kumpulan dari barang bukti tertulis dan cetak. Dalam penelitian ini data yang di peroleh berasal dari:

1. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten data berupa: Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 1999, Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilu 1999 di Jawa Tengah, Buku Pemilu 1999 dalam angka, Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu 1999.
2. Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Klaten arsip berupa: SK DPP PKB tentang susunan pengurus DPC PKB Klaten, Daftar SK DPC PKB Klaten tentang susunan PAC PKB, Surat instruksi DPC PKB untuk tidak melakukan kampanye putaran terakhir, Surat himbauan DPC PKB Klaten menjelang Pemilu, Profil singkat PKB.
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Klaten data yang di peroleh berupa: Buku Klaten dalam angka, Buku Klaten dari masa ke masa.
4. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten arsipnya berupa: Surat Pembagian tugas pembinaan wilayah PCNU Klaten, Surat PWNU Jawa tengah tentang amaliah menjelang Pemilu 1999, Surat instruksi PBNU tentang amaliah menjelang Pemilu 1999, Daftar Pondok Pesantren NU di Klaten.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tehnik pengumpulan data dengan memanfaatkan literatur dan referensi yang berupa pustaka, jurnal atau majalah, sebagai bahan informasi untuk mendapatkan teori dan data skunder baru sebagai pelengkap dalam menganalisa peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini referensi yang di peroleh dari

Monumen Pers Surakarta yang berupa surat kabar dan jurnal antara lain Bernas, Kompas, Tempo, dan Forum Keadilan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa merupakan langkah yang harus ditempuh setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Tahap analisa ini merupakan tahapan yang menentukan dan penting. Pada tahap ini data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, dengan menggunakan tehnik analisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan *post factum*, suatu pendekatan yang dipakai untuk menganalisa data berdasarkan fakta-fakta setelah suatu peristiwa terjadi. Analisa data ini terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika tertentu dan disesuaikan dengan kronologi peristiwa yang terjadi berdasarkan waktu. Penyusunan itu merupakan suatu upaya agar mudah memahami tulisan ini. Adapun sistematika penulisan tersusun sebagai berikut :

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah dalam penelusuran sumber-sumber penelitian

Bab II memberi penjelasan terkait dengan berdirinya NU di Kabupaten Klaten dan perkembangannya secara singkat sampai pada terbentuknya PKB. Bagaimana perkembangan politik NU dari tahun ke tahun pada masa Orba juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab III menguraikan bagaimana proses berdirinya PKB sebagai perwujudan gerakan politik Islam NU pascareformasi 1998. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam pendirian PKB sampai sejauhmana mereka berjuang untuk mendirikan PKB di jelaskan dalam bab ini.

Bab IV memberi uraian mengenai peranan NU sebagai organisasi masyarakat yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia dalam mensukseskan PKB, terutama di Kabupaten Klaten pada Pemilu 1999.

Bab V merupakan kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

BAB II

Nahdhlatul Ulama (NU) di Kabupaten Klaten

A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan kota administratif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 22 Oktober 1987. Kabupaten Klaten sudah tidak mengenal istilah kota administratif sejak diberlakukan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wilayah Kota Administrasi Klaten yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten pascapemberlakuan UU tersebut.¹⁷ Daerah tingkat II ini semula hanya memiliki sebanyak 21 kecamatan, tetapi sekitar tahun 1982-1987 terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 21 kecamatan menjadi 26 kecamatan. Dengan demikian ada 5 kecamatan baru dari hasil pemekaran wilayah pada tahun 1980-an itu, yaitu Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Selatan dan Kecamatan Klaten Tengah.¹⁸

Sampai sekarang sejarah Kabupaten Klaten masih menjadi silang pendapat para sejarawan, karena belum ada penelitian yang dapat menyebutkan kapan

¹⁷ Badan Pusat Statistik, 2000, *Klaten Dalam Angka 1999*, Klaten: BPS-Bappeda Kabupaten Klaten.

¹⁸ Wawancara dengan KH Ida Royani, Ketua PAC PKB Kec Tulung&A'wan Syuriyah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Klaten, 30 Mei 2009.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, <http://klatenonline.com/klaten/sejarah-kota-klaten.htm>.

persisnya Kabupaten Klaten ini berdiri.³ Peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten diambil dari awal terbentuknya pemerintahan daerah otonom pada tahun 1950. Kabupaten Klaten semula adalah bekas daerah swapraja di bawah Keraton Kasunanan Surakarta. Setiap kabupaten terdiri atas beberapa distrik. Susunan penguasa kabupaten terdiri dari Bupati, Kliwon, Mantri Jaksa, Mantri Kabupaten, Mantri Pembantu, Mantri Distrik, Penghulu, Carik Kabupaten angka 1 dan Carik Kabupaten angka 2, Lurah Langsik, dan Langsir pada kala itu.⁴

Ada dua versi yang menyebut tentang asal muasal nama Klaten. *Pertama*, nama 'Klaten' berasal dari kata *kelati* atau buah bibir. Kata *kelati* ini kemudian mengalami disimilasi menjadi Klaten. *Kedua*, nama 'Klaten' berasal dari kata 'Melati'. Kata 'Melati' kemudian berubah menjadi 'Mlati'. Kata itu berubah lagi menjadi kata 'Klati', sehingga memudahkan ucapan kata 'Klati' dan akhirnya berubah menjadi kata Klaten. Versi kedua ini didasarkan pada bahasa tutur atau sejarah lisan para orangtua. Kata 'Melati' diambilkan dari nama seorang Kiai Melati Sekolekan yang datang ke wilayah ini kali pertama sekitar 560 tahun silam. Kiai itulah yang dipercaya penduduk setempat sebagai cikal bakal berdirinya Klaten. Sebuah dukuh tempat tinggal Kyai Melati oleh masyarakat setempat selanjutnya diberi nama Sekolekan. Nama dukuh tersebut lambat laun berubah menjadi Sekolekan. Di dukuh itu juga ditemukan makam Kiai Melati Sekolekan sebagai bukti sejarah atas bahasa tutur itu.¹⁹

⁴ *Ibid*

¹⁹ Bagian Ortakala Sekretaris Daerah, Klaten dari masa ke masa, Dati II Klaten Tahun 1999/1993

Dalam perjalanan sejarahnya, luas daerah Kabupaten Klaten mengalami beberapa kali pemekaran. Kabupaten Klaten mendapatkan tambahan wilayah dari Kabupaten Boyolali, yaitu dengan bergabungnya Kecamatan Jatinom dan Polanharjo pada 11 Oktober 1985. Pemekaran wilayah juga terjadi pada daerah onderdistrik. Daerah onderdistrik terdiri dari beberapa dukuh yang dipimpin seorang Demang dengan upah berupa tanah pituas. Luas tanah pituas antara Demang yang satu dan Demang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan besar kecilnya jasa yang diberikan kepada Keraton Kasunanan Surakarta. Penerima upah tanah pituas terkecil diberikan kepada Bekel, kemudian Demang, Ronggo, dan terbesar disebut Ngabei.²⁰

Dalam perkembangannya, tepatnya pada tahun 1914 dibentuk daerah onderdistrik diubah menjadi kelurahan. Daerah baru ini memiliki daerah bawahan yang sama dengan onderdistrik, yaitu penggabungan dari beberapa dukuh. Tanah pituas yang semula untuk upah Bekel, Demang, Ronggo, dan Ngabei, diberikan pada kelurahan sebagai milik desa dengan nama tanah *lungguh* pamong desa. Struktur organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, Kamituwa, Carik, Kebayan, Modin, dan Ulu-ulu. Tahun 1957 dilakukan *pemblengketan* atau penggabungan beberapa kelurahan atas ketentuan Pemerintah Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa setiap kelurahan paling sedikit harus berpenduduk 1.300 orang. Peristiwa itu dikenal sebagai masa kompleks. Masa kompleks di Klaten telah terjadi sejak tahun 1917. Proses penggabungan kelurahan di beberapa onderdistrik disebabkan atas adanya beberapa

²⁰ *Ibid*

kelurahan yang tidak mempunyai tanah untuk kas desa maupun untuk *lungguh* bagi pamong desa.²¹

B. Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Klaten

Jaringan ulama tradisional yang sering dikenal dengan sebutan kiai belum terorganisasi secara baik sejak zaman kolonial hingga menjelang kemerdekaan di Klaten. Hubungan ulama masih bersifat parsial pada kelompok-kelompok belajar agama (kelompok pengajian) yang nantinya berkembang sebagai pondok pesantren. Keterkaitan ulama satu dengan ulama lainnya biasanya terjalin dengan ikatan tradisi, terutama tradisi Jawa, seperti upacara adat bersih desa, upacara perkawinan dan upacara kematian. Pada bagian upacara tersebut peranan ulama lokal cukup dominan, karena kemampuan masyarakat awam tentang ilmu-ilmu agama masih minim. Sebagian besar ulama atau kiai dipercaya masyarakat untuk memohonkan doa-doa agar selamat dunia dan akherat.

Seseorang agar bisa mendapat kepercayaan atau sebutan kiai atau ulama (dalam tradisi Nahdlatul Ulama) harus melalui proses pembelajaran di pesantren. Setiap pesantren di Jawa, terutama di Jawa Tengah memiliki jenis pembelajaran yang berbeda-beda, tergantung keahlian ilmu agama yang dimiliki kiai pengasuh pondok pesantren tersebut. Ada pondok pesantren yang khusus mempelajari ilmu Al-Quran, ada yang mengkhususkan mempelajari ilmu fiqh, hadits, mantiq dan sebagainya.

²¹ Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Klaten, hlm 11-15

Semakin banyak ilmu agama yang dikuasai kiai, maka semakin banyak pula pengikutnya.²²

Hubungan antarpesantren ini terjadi dari pola komunikasi tradisional. Tradisi yang mengharuskan seorang santri pergi dari satu pesantren ke pesantren lain untuk menambah pengetahuannya menjadi salah satu komunikasi yang efektif dalam memperkuat hubungan antarpesantren. Pemikiran santri semakin berkembang melalui pola hubungan antarpesantren. Ilmu yang diberikan kiai yang satu dengan kiai yang lain otomatis akan menambah khasanah keilmuan santri. Santri itu sendiri berkembang dan berproses sampai menjadi kiai atau ulama di daerah asalnya. Perbedaan pendapat antarkiai sering terjadi dalam tradisi pesantren, tetapi perbedaan itu dijadikan rahmat bukan dijadikan alat untuk saling menjatuhkan. Kendati demikian, perbedaan pendapat itu berdampak pada munculnya dua kelompok yang bertolak belakang, yaitu kelompok ulama reformis dan kelompok ulama tradisional. Perdebatan pemikiran ulama itu sangat terlihat pada kongres-kongres Al-Islam yang diadakan di beberapa wilayah untuk mengusulkan masukan dari sejumlah kiai di Indonesia, terutama dalam menyikapi penghapusan kekhalifahan oleh Turki dan serbuan kaum wahabi ke Mekah pada tahun 1924.²³

Perbedaan pandangan antara kaum reformis dan tradisional itu terlihat dalam implementasi tata cara ibadah keagamaan. Di satu sisi kelompok ulama tradisional tetap mempertahankan tata cara keagamaan dengan membaca doa *delail al khairat*,

²² Feillard, 1999, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, hlm 11

²³ *Ibid*

membangun kuburan, berziarah, kepercayaan terhadap wali dan ajaran mazhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Tata cara keagamaan seperti itu justru ditentang oleh kelompok wahabi puritan atau kelompok reformis. Kelompok tradisional membentuk komite yang disebut dengan Komite Hijaz untuk memperjuangkan kepentingan kaum tradisional. Pada tanggal 31 Januari 1926 diputuskan untuk membentuk suatu organisasi yang mewakili Islam tradisional dengan nama Nahdlatul Ulama atau Nahdaltul Ulama (NU). Pembentukan organisasi itu dilanjutkan dengan Mukhtamar kali pertama pada Oktober 1926 dan menghasilkan keputusan pengiriman delegasi ke Mekah. Delegasi Indonesia itu membawa permintaan kaum tradisional untuk melaksanakan ajaran empat mazhab, yakni Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Permintaan NU itu akhirnya dikabulkan setelah menerima balasan dari Mekah.²⁴

NU mulai menetapkan tujuannya untuk mempromosikan anutan yang ketat pada keempat mazhab tersebut dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam pada Mukhtamar NU tahun 1928. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan. *Pertama*, mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab sama. *Kedua*, memeriksa kitab-kitab sebelumnya yang dipakai untuk mengajarkan supaya diketahui apakah kitab itu berasal dari *Ahli Sunnah Wal Jamaah* atau kitab-kitab ahli *bid'ah*. *Ketiga*, menyiarkan agama Islam di atas mazhab-mazhab tersebut melalui jalan apa saja. *Keempat*, berhiyar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam. *Kelima*, memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, langgar-

²⁴ *Ibid*, hlm 12.

langgar dan pondok-pondok, termasuk perhatian dengan hal anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. *Keenam*, mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syariat Islam.²⁵

NU mampu berkembang hingga ke pelosok pedesaan Jawa dengan ikhtiar tersebut. Kelahiran NU di Kabupaten Klaten ini juga dimotori oleh sejumlah ulama dari beberapa daerah sekitarnya yang berada di bawah kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta. Perkembangan NU di Klaten sangat dipengaruhi oleh perkembangan NU di Surakarta, karena berdirinya NU di Klaten dibidani oleh sejumlah ulama tradisional Surakarta tepatnya pada tahun 1946, satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia. NU Klaten semula hanya sebagai wadah kecil yang masih bergabung dengan kepengurusan NU di Kabupaten Boyolali dan masih menginduk pada NU di Surakarta. Meskipun NU Klaten sudah memiliki struktur organisasi sendiri lengkap dengan administrasinya, namun para pengurusnya tidak berjalan tertib sebagaimana mestinya.²⁶

Seorang kiai yang disegani dan dinamis KH Abdul Rahim berinisiatif untuk mengembangkan NU dengan mendirikan kantor pusat di daerah perkotaan Klaten. Keberadaan NU di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper dinilai kurang dikenal masyarakat, sehingga KH Abdul Rahim mencoba mencari tokoh yang pernah dipercaya membawa stempel NU yang dikenal dengan sebutan Mbah Sastra. Akhirnya kepengurusan NU Klaten diboyong dari Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper ke Klaten kota pada awal Januari 1947, tepatnya di Desa Mlinjon, Kecamatan

²⁵ *Ibid*, hlm 13.

²⁶ Wawancara dengan KH. Mustamari, 9 Mei 2009

Klaten Tengah. Kepengurusan NU Kabupaten Klaten dibentuk dengan susunan pengurus terdiri atas, Ketua KH Abdul Rahim, Wakil Ketua KH Sofwan, Sekretaris KH Kunawi dan Bendahara KH Puspo Diharjo. NU berdiri pada tahun 1946 setelah menemukan pembawa stempel dari Solo, yaitu Mbah Sastra di Ngawonggo. Saya dan Abdul Rahim ke Ngawonggo meminta stempel itu untuk dasar penyusunan pengurus NU tingkat kabupate. Awal Januari 1947 NU bisa diboyong ke Klaten kota dengan menyusun pengurus, Ketua KH Abdul Rahim, Wakil Ketua KH Sofwan, Sekretaris KH Kunawi dan Bendahara KH Puspo Diharjo. Saya sebagai Ketua GP Anshor tingkat kabupaten.²⁷

Perkembangan NU pascadeklarasi kepengurusan belum begitu kentara, karena struktur organisasinya masih kecil. Sejumlah ulama NU pada saat itu masih belum banyak, namun embrio NU sudah muncul di sejumlah wilayah melalui banyaknya kelompok-kelompok pengajian (majelis taklim). Para kiai NU Klaten mulai melebarkan sayap melalui kegiatan-kegiatan keagamaan tradisional sesuai dengan semangat Muktamar NU sebelumnya.²⁸

Pusat kegiatan belajar keagamaan pada saat itu baru ada satu, yakni Pondok Pesantren Al-Manshur di Desa Popongan kecamatan Wonosari yang merupakan pondok pesantren tertua di Kabupaten Klaten. Semua aktivitas gerakan politik NU disusun dan direncanakan di pesantren tersebut, terutama untuk menghadapi Pemilu 1955. Ada perubahan yang mendasar dalam struktur kepengurusan NU, di mana semua pengurus NU juga merangkap menjadi pengurus Partai NU. NU bukan lagi

²⁷ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009

²⁸ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009

murni sebagai organisasi sosial keagamaan, melainkan juga menjadi organisasi politik pada saat itu. Dari Musyawarah Cabang NU menghasilkan susunan pengurus, Rais Syuriah Kiai Nawawi, Ketua Tanfidziah KH Ali Suhudi, Sekretaris Mustamari dan Bendahara KH Sholekhan.²⁹

Model penyebaran dakwah NU masih bersifat tradisional, melalui pengajian-pengajian dan kegiatan tahlilan saat peringatan hari kematian dan sebagainya. Perkembangan dakwah NU tidak hanya didominasi oleh kiai, tetapi generasi muda NU yang tergabung dalam Gerakan Pemuda (GP) Anshor juga berperan dalam penyebaran ajaran *Ahli Sunnah wal Jamaah*. Pendirian Majelis Wakil Cabang (MWC) di tingkat kecamatan hampir selalu didampingi berdirinya organisasi pemuda GP Anshor. Kegiatan-kegiatan syiar keagamaan sering dipusatkan di Kantor MWC, seperti kegiatan pengajian peringatan hari besar Islam dan peringatan hari bersejarah dalam Islam. Penyebaran dakwah NU pada tahun 1960-an sangat dipengaruhi oleh alat transportasi yang digunakan. Hampir sebagian besar penduduk di Klaten saat itu belum memiliki alat transportasi yang memadai. Sepeda masih menjadi alat transportasi yang cukup efektif untuk komunikasi lintas daerah. Oleh karenanya tidak mustahil, ketika ditemukan tokoh yang memiliki kendaraan bermotor akan mampu memobilisasi massa dengan baik.

”Tahun 1960-an perkembangan NU mulai ramai, di Juwiran ada seorang sarjana muda pandai yang mampu untuk menggerakkan pengurus cabang agar berdiri lebih baik. Komunikasi menjadi mudah dan cepat, karena

²⁹ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009

pemuda itu memiliki kendaraan bermotor satu-satunya di wilayah Juwiran”.³⁰

Pertumbuhan organisasi NU menjadi berkembang pesat setelah mantan Ketua Pimpinan Cabang (PC) NU Klaten, Ali Suhudi terpilih menjadi Badan Pengurus Harian (BPH) Kabupaten Klaten dari hasil Pemilu lokal pada tahun 1962. Organisasi NU diberikan kantor tersendiri di pusat kota. Jumlah MWC di tingkat kecamatan juga sudah terbentuk di 10 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada, di antaranya MWC Kecamatan Tulung, MWC Kecamatan Karangnom, MWC Kecamatan Ceper, MWC Kecamatan Karangnongko, MWC Kecamatan Delanggu, MWC Kecamatan Wonosari, MWC Kecamatan Trucuk dan MWC Kecamatan Bayat. Minimnya pembentukan MWC NU di tingkat kecamatan disebabkan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten masih didominasi Muhammadiyah. Kemudian pesantren-pesantren juga mulai bermunculan meskipun masih dalam tataran kecil, seperti Pesantren Raudlatush sholihin Batur, Pesantren Al- Muttaqien Karang Anom, Pesantren Nurul Dholam Ceper.³¹

Embrio pesantren bermula dari gerakan jamaah yang masih bersifat tradisional yang dipelopori oleh KH Mashudi di Kecamatan Karangnongko dan KH Salman Dahlawi di Desa Popongan, Kecamatan Wonosari. KH Salman Dahlawi merupakan pemimpin Pondok Pesantren Al Manshur generasi ketiga. Sementara KH Mashudi akhirnya mendirikan Pondok Pesantren Darul Qur'an. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Al Mumajad di Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen. Kemudian

³⁰ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009

³¹ Wawancara dengan KH Ida Royani, 30 Mei 2009.

disusul Pondok Pesantren Roudlatuz Zahidin Karanganom, Pondok Pesantren Nurul Dholam Ngaran Mlese Ceper dan Pondok Pesantren Al-Muttaqien Karanganom.³²

Menjelang tahun 1965 Klaten menjadi basis perlawanan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap kaum religius. Para tokoh yang duduk dalam lembaga keagamaan seperti Departemen Agama dan Pengadilan Agama menjadi sasaran pelampiasan kekejaman kaum komunis. Bahkan kaum komunis itu sudah membuat daftar hitam tokoh-tokoh agama, terutama dari kalangan pesantren untuk dijadikan target operasi. Jumlah tokoh agama saat itu menurut Sekretaris PC NU tahun 1960-an KH Mustamari mencapai puluhan tokoh.

”Nama saya juga masuk dalam daftar hitam orang-orang PKI itu. Saya sempat diberitahu saudara saya yang bergabung dalam organisasi pemuda PKI agar hati-hati saat melintasi daerah Sungkur. Daerah tersebut merupakan pusat gerakan PKI, karena Ketua PKI Klaten pada saat itu tinggal di daerah itu. Saya sempat takut juga, karena saya dianggap sebagai kelompok kaum agama. Saya menurut saja dan tidak jadi melewati daerah itu.³³

Kebencian kaum komunis terhadap golongan ulama tradisional cukup mencolok pada saat Ali Suhudi menjadi Kepala BPH Kabupaten Klaten. Pada tahun-tahun 1960-an, hampir setiap perangkat desa berasal dari warga NU, termasuk para guru agama juga diambilkan dari ulama NU. Kedudukan NU yang sudah kuat hingga sampai ke tingkat desa, maka NU memiliki peranan yang cukup dominan dalam penumpasan PKI pada tahun 1968. Mantan Sekretaris GP Anshor Kabupaten Klaten, Bambang Suprobo menyatakan, bendera PKI pada saat itu sangat banyak, namun

³² Wawancara dengan KH Ida Royani, 30 Mei 2009

³³ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009

pengikut PKI yang militan hanya sedikit. Peranan NU dalam penumpasan PKI cukup besar, karena NU berada di garis depan dan turut terlibat dalam perpolitikan.³⁴

Selanjutnya menjelang Pemilu 1971 pertemuan-pertemuan antarkiai dilakukan secara intensif hampir setiap *selapan* sekali atau 35 hari sekali dalam bentuk kegiatan mujahadah yang sering disebut dengan *lailatul Ijtima'*. Sebuah kegiatan keagamaan khas NU untuk menguatkan keimanan dan memberikan semangat kepada pengurus dalam menyukseskan Pemilu 1971 itu. Dengan melalui model pendekatan dari mulut ke mulut atau *gethok tular*, NU Klaten mampu meraih enam kursi di DPRD dari hasil Pemilu 1971. Pemerintah menghadapkan partai-partai pada sebuah *fait accompli* pascakemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, bahwa mulai saat itu DPR, termasuk DPRD dibagi menjadi empat kelompok, yakni Angkatan Bersenjata, Golkar, golongan pembangunan demokrasi dan golongan pembangunan persatuan.³⁵ Keputusan itu mengawali adanya penyederhanaan partai politik, di mana partai-partai Islam bergabung atau fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai-partai nasionalis juga fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).³⁶

C. NU keluar dari PPP di Klaten

Andree Feillard menerangkan sistem massa mengambang yang melarang partai-partai untuk melakukan kegiatan politik apa pun di desa-desa jelas tidak menguntungkan bagi NU. Partai-partai diberi hak untuk mempunyai satu komisaris

³⁴ Wawancara dengan Drs. Bambang Suprobo Ketua DPC Klaten., 28 Februari 2009.

³⁵ Andree Feillard, *Nu vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, 1999, Yogyakarta : LKiS, hlm 173.*

¹⁹ *Ibid*, hlm 175

dan beberapa pembantunya di desa, namun pertemuan para wakil partai tersebut harus disertai izin dari pemerintah setempat. Dengan demikian sistem tersebut menguntungkan Golkar, karena pejabat pemerintah setempat juga anggota partai pemerintah.³⁷

Hasil fusi tersebut berdampak negatif bagi golongan tradisionalis seperti NU, di mana pengaruhnya akan berkurang, karena sebagian anggota NU di Klaten justru banyak yang masuk ke Golkar dan hanya sebagian kecil yang tetap bertahan di PPP. Anggota NU yang menyeberang ke Golkar kebanyakan untuk mempertahankan kedudukannya menjadi pegawai pemerintahan. Hampir semua pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten harus menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah dengan masuk menjadi anggota Golkar, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama Klaten. Demikian halnya mantan sekretaris PC NU Klaten KH Mustamari dengan terpaksa harus menerima tawaran Bupati Klaten menjadi ulama Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dengan fasilitas kenaikan jabatan pada periode tertentu untuk menunjukkan loyalitas kepada pemerintah. Syarat untuk menduduki jabatan itu, KH Mustamari harus masuk menjadi bagian dari Golkar dalam afiliasi politiknya dan beliau menyetujuinya.³⁸ Kedudukan NU di samping partai Islam lainnya di dalam PPP tidak sekuat saat NU menjadi partai politik sendiri.

Pada Mukhtar ke-27 NU di Situbondo pada tahun 1984 para kiai NU membuat kesepakatan untuk kembali ke *khittah* 1926, dan NU telah disahkan keluar

³⁷ *Ibid*

³⁸ Wawancara dengan KH. Mustamari, 9 mei 2009.

dari PPP.³⁹ *Khittah* 1926 merupakan garis perjuangan bagi NU untuk kembali pada posisi awal asal kelahiran NU. Sejak tahun 1984, NU tidak lagi berkecimpung dalam politik praktis, melainkan kembali kepada Ormas yang mengurus sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Perkembangan sekolah-sekolah belabel Ma'arif menunjukkan bahwa keberadaan NU sudah meluas. Istilah Ma'arif merupakan istilah NU yang sebelumnya berafiliasi ke PPP. Oleh karena NU menyatakan keluar dari PPP, maka nama-nama sekolah NU yang masih menggunakan label Ma'arif diganti semua.⁴⁰

Semula SMA Al-Ma'arif diganti SMA Al Makruf fi Kudus. Istilah Maarif NU, adalah NU yang beralifiliasi PPP. Dengan diganti, maka sekolah itu bisa hidup. Kalau di Klaten, sekolah-sekolah yang dikelola tokoh NU adalah Ponpes, di luar Ponpes membuat lembaga sendiri, bukan Ma'arif. Seingat saya, MTS Sunan Kalijaga di Kecamatan Tulung semula MTS Al-Ma'arif. MTS di Kecamatan Kemalang juga demikian. Sekarang muncul sekolah-sekolah yang dikelola NU.⁴¹

Keputusan NU Klaten keluar dari PPP bukan semata-mata tidak lagi terlibat dalam perpolitikan, tetapi lebih pada mengubah orientasi politik NU melalui jalur-jalur lain, seperti pendidikan, sosial dan agama. Bentuk-bentuk kegiatan NU di tingkat MWC mulai dari *lailatul Ijtima'*, majlis tahlil dan majlis dzikir dihidupkan kembali sampai ke tingkat ranting. Pendidikan yang tergabung dalam Ma'arif yang terbentuk sejak tahun 1970-an juga dihidupkan. Setidaknya sudah ada tujuh pondok pesantren yang mengelola pendidikan Ma'arif hingga tahun 1980-an. Pendidikan

³⁹ A Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, 2002 hlm 94

⁴⁰ Wawancara dengan Drs. H Bambang Suprobo, 28 Februari 2009

⁴¹ Wawancara dengan Drs. H Bambang Suprobo, 28 Februari 2009

tersebut dipusatkan di pondok pesantren dengan tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari tingkatan ibtidiah (SD), tsanawiyah (SMP) dan Aliyah (SMA).

”Kepala Kandepag (Kantor Departemen Agama) Kabupaten Klaten menginstruksikan kepada saya supaya menegerikan sekolah tsanawiyah di Mlinjon. Jabatan pengelola MTs (Madrasah Tsanawiyah) itu diserahkan kepada saya dan KH Amin”.⁴²

D. NU Klaten Menjelang Pemilu 1999

Kebijakan NU Klaten sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari sejumlah anggota DPRD dari PPP Klaten selama fusi dengan partai belambang ka’bah itu. Hal itu berdampak pada terjadinya konflik di internal PPP. Persoalan itu sudah diprediksikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat munculnya wacana untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. NU Klaten tetap menjunjung tinggi kemerdekaan dan *khittah 1926* dengan menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. NU Klaten juga tetap mempertahankan kesatuan negara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NU Klaten memiliki pandangan sendiri tentang politik untuk memperjuangkan semangat NU tersebut. NU Klaten memegang tiga pandangan dalam berpolitik, yakni politik kebangsaan yang menegaskan bahwa NKRI merupakan harga mati bagi NU. Politik kekuasaan sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan politik kebangsaan yang didukung oleh politik kerakyatan.

Selama masa Orde Baru tidak pernah ada benturan antara NU dengan pemerintah atau Golkar di Kabupaten Klaten, karena sebagian besar tokoh-tokoh NU

⁴² Wawancara dengan KH. Mustamari, 9 Mei 2009.

sudah masuk ke Golkar, terutama mereka yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Posisi NU masih termasuk minoritas di Klaten pada tahun-tahun sebelum reformasi. NU Klaten hanya memiliki satu wakil yang duduk di parlemen daerah dari hasil Pemilu 1977. Keterwakilan NU tersebut bertahan sampai Pemilu 1982, Pemilu 1987 dan Pemilu 1992. Baru hasil Pemilu 1997, NU memiliki dua kursi di DPRD Kabupaten Klaten, karena jumlah kursi PPP naik dari 7 kursi menjadi 11 kursi.⁴³ Peningkatan kursi PPP pada Pemilu 1997 itu tidak lepas dari kesadaran politik warga NU Klaten sendiri, karena selama 4 kali Pemilu, NU hanya memiliki satu wakil. Potensi warga NU untuk menggerakkan massa dalam mengisi keterwakilan politik cukup besar dan potensi ini dijadikan modal utama dalam Pemilu 1999 dengan membawa kendaraan partai sendiri.⁴⁴

NU Klaten merupakan organisasi sosial keagamaan yang bertujuan untuk menegakkan ajaran islam menurut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah NKRI. Struktur organisasi NU dari tingkat pusat, wilayah, cabang dan MWC terdiri atas *Mustasyar* (penasehat), *Syuriyah* (Pimpinan tertinggi) dan *Tanfidziyah* (pelaksana harian), sedangkan di tingkat Ranting (kelurahan/desa) struktur kepengurusannya hanya *Syuriyah*. NU membentuk badan kerja yang bersifat otonom sebanyak 9 badan otonom untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat, yaitu;

1. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah.
2. Muslimat NU

⁴³ Wawancara dengan Drs. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009

⁴⁴ Wawancara dengan Drs. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009

3. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).
4. Fatayat NU
5. Ikatan Pelajar NU (IPNU).
6. Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU).
7. Ikatan Sarjana NU (ISNU).
8. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)
9. Jami'iyatul Qurro wal Huffadz (JQH).⁴⁵

Sementara itu NU Klaten juga memiliki lembaga-lembaga yang bersifat khusus untuk implementasi kebijakan organisasi yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu, sebagai berikut;

1. Lembaga Dahwah NU (LDNU), sebagai lembaga pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) di bidang dakwah Islamiyah.
2. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU), merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
3. Lembaga Februari Perekonomian NU (LPNU), merupakan lembaga pengkajian ekonomi, pemetaan potensi ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat NU.
4. Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU).
5. Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), suatu lembaga pengembangan kualitas pendidikan pesantren.
6. Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI).
7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam).

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. Bambang Suprobo, 28 2009

8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH).
9. Lajnah Bahtsul Masail (LBM_NU), sebuah lembaga pengkajian masalah-masalah aktual kemasyarakatan, perumusan dan penyebarluasan fatwa hukum Islam.⁴⁶



⁴⁶ Wawancara dengan Drs. Syamsuddin, M. Hum, Ketua PCNU Klaten, 24 September 2008.

BAB III

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Klaten

A. Dinamika Partai Politik

Munculnya gerakan politik dengan menggunakan sarana organisasi massa di Indonesia tidak bisa terlepas dari lahirnya paham-paham nasionalisme sejak awal abad XX, meskipun masih bersifat prematur. Sejumlah organisasi massa seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo merupakan contoh gerakan nasionalis yang terbentuk oleh pengaruh agama, sosial-ekonomi, kultural dan unsur-unsur lokal lainnya.⁴⁷ Gerakan-gerakan lokal tersebut juga berdampak pada terciptanya sejumlah elit politik lokal atau sering disebut dengan kaum intelektual. Kaum intelektual pada saat itu banyak dipengaruhi oleh paham-paham sosialisme, islam reformis, komunisme dan nasionalisme, karena sebagian besar mereka merupakan produk dari pendidikan Barat.⁴⁸

Gerakan politik lokal mengalami perkembangan yang pesat pasca-Perang Dunia I (1914-1918), dengan munculnya partai-partai politik, seperti Partai Komunis Indonesia (1920), Indische Partaj (PI) pada tahun 1922, dan Perserikatan Nasional Indonesia (1927) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Demikian halnya pasca-Perang Dunia II, jumlah partai politik di Indonesia justru mengalami peningkatan, apalagi menjelang Pemilu 1955. Beberapa partai

⁴⁷ Thom Kerstien, 1966, *The New Elite in Asia and Africa: A Comparative Study of Indonesia and Ghana*, New York : Frederick A, Praeger Publisher, hlm 85.

⁴⁸ Sartono Kartodirdjo (ed), 1981, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : LP3ES, hlm 159

tambahan menghiasi konstelasi politik tanah air, seperti Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Nasional (PRN), Masyumi, NU dan dua partai besar yakni PNI dan PKI serta sejumlah partai lainnya. Kemunculan partai politik di Indonesia sejak pertengahan tahun 1945, tepatnya pada 30 Oktober 1945, ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen sementara sebelum diadakan Pemilu mengeluarkan keputusan untuk membentuk sistem kepartaian atas dasar konsep multipartai. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan agar berbagai pendapat di masyarakat dapat tersalurkan secara tertib. Pertimbangan lainnya agar Parpol dapat memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan bangsa. Keputusan itu diperkuat dengan terbitnya Maklumat Pemerintah Nomor X, tertanggal 3 November 1945.⁴⁹

Partai politik itu bukanlah memiliki visi yang sama untuk kemakmuran rakyat, tetapi berujung pada konflik politik, baik antara pusat dan daerah, konflik politik antarpartai aliran sampai pada konflik politik Jawa dan luar Jawa. Hasil Pemilu tahun 1955 yang menghasilkan empat kekuatan politik utama, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI ternyata tidak mampu menyelesaikan konflik politik yang ada. Banyak para elit politik dan elit militer yang mensinyalir bahwa penyebab kekacauan politik yang terjadi berasal dari konstitusi liberal. Sebagai langkah solutif yang diambil pemerintah, maka pada 10 November 1956 dibentuklah Badan Konstituante untuk menyusun UUD baru. Pembahasan konstitusi dalam Badan Konstituante ternyata tidak menghasilkan produk untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sebaliknya,

⁴⁹ Abdul Aziz, 2006, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 35.

perpecahan dan pertentangan terjadi di tubuh Badan Konstituante itu antara pro dan kontra tentang bentuk Negara Islam. Dalam Sidang Konstituante di Bandung 22 April 1959, Presiden Sukarno (Presiden RI I) menyerukan agar konstitusi RI dikembalikan kepada UUD 1945 dan ditindaklanjuti dengan dikeluarnya dekrit pada 5 Juli 1959.⁵⁰

Andree Feillard mencatat penyederhanaan partai politik kali pertama berlangsung pada tahun 1960. Sebanyak 40 partai politik lebih disederhanakan menjadi 12 partai dan kemudian menjadi 10 partai. Masyumi dan PSI dilarang, dan di parlemen partai-partai harus mengelompokkan diri menjadi empat kategori, yaitu nasionalis, Islam, Kristen dan Komunis.⁵¹

Peristiwa 1965 mampu melumpuhkan kekuatan komunis, tetapi juga memberikan euphoria bagi partai-partai politik aliran nonkomunis untuk berupaya tampil di pentas politik. Kekuatan politik yang semula berada pada Sukarno, mulai bergeser ke militer. Harapan demokrasi kemudian tertuju pada penyelenggaraan Pemilu. Namun pejabat Presiden Suharto justru memberikan laporan kepada MPRS pada 10 Januari 1968, bahwa Pemilu tidak dapat segera dilaksanakan pada 6 Juli 1968 sesuai dengan Tap MPRS. Akhirnya laporan tersebut menjadi agenda Sidang MPRS 27 Maret 1968 dan memutuskan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 5 Juli 1971 dan pengangkatan Suharto sebagai Presiden RI. Proses politik sebelum Pemilu 1971 banyak yang merugikan partai politik, sehingga sebagian besar partai politik tidak siap dengan pelaksanaan Pemilu. Masuknya Golongan Karya (Golkar)

⁵⁰ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU; Eksperimentasi Pemikiran Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca kembali ke Khittah 1926*, Jakarta : Pustaka Ciganjur, 2002, hlm 89

⁵¹ Feillard, Andree, 1999 *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LKIS, hlm 171.

sebagai kontestan Pemilu yang digelar 3 Juli 1971 menjadi pertanyaan konstantan lainnya.⁵²

Tabel 1

Hasil Perolehan Kursi Empat Partai Besar berdasarkan Pemilu 1955

No	Nama Partai Politik	Persentase Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	22,3%
2.	Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumin)	20,9%
3.	Partai Nahdlatul Ulama	18,4%
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	16,4%

Sumber : Abdul Aziz, *Politik Islam Politik : Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006, hlm 43.

Tabel 2

Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di Parlemen berdasarkan Pemilu 1971

No	Uraian	Jumlah kursi
1.	Golongan Karya (Golkar)	227 kursi
2.	Partai Nahdlatul Ulama (NU)	58 kursi
3.	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	24 kursi
4.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	20 kursi
5.	Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)	10 kursi

.Sumber : Susanto dalam makalah *Budaya Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Surakarta : Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS, 2009, hlm 11.

Dari tabel diatas perbandingan perolehan kursi partai politik berdasarkan hasil Pemilu 1955 dan Pemilu 1971 menunjukkan bahwa kekuatan partai berbasis Islam cukup dominan dalam parlemen. Partai NU menjadi partai pemenang ke empat pada tahun 1955, lantaran partai tersebut ditompang oleh masyarakat Nahdliyin. Hasil Pemilu 1971 membuktikan bahwa kekuatan terbesar berada di tangan Golkar yang

⁵² *Ibid*

notabene berasal dari kalangan militer dan pegawai negeri sipil (PNS). Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 itu tidak murni dari kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam berdemokrasi, tetapi lebih sebagai akibat mobilisasi massa oleh kekuatan penguasa terhadap militer dan PNS, dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan negara.⁵³

Sementara kekuatan partai nasionalis tetap menempati urutan di belakangnya partai Islam. Kekuatan partai Islam inilah belakangan bakal menjadi kekuatan politik tandingan terhadap Golkar pada Pemilu-Pemilu berikutnya dan menjadi ancaman tersendiri bagi Golkar dalam mempertahankan kekuasaannya. Oleh karenanya berbagai upaya untuk mempertahankan diri sebagai partai penguasa terus digencarkan, salah satunya dengan memberikan batasan pada jumlah partai pada tahun 1973. Sebanyak empat partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti) digabung menjadi satu partai dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lima partai nasionalis (PNI, IPKI, Partai Murba) dan partai kristen (Parkindo dan Partai Katolik) juga fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Praktis kekuatan politik pada zaman orde baru itu terbagi menjadi tiga, yakni Golkar, PPP dan PDI.⁵⁴

Dalam landasan yuridis yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya menjelaskan bahwa hanya ada dua organisasi politik pada saat itu, yaitu partai politik dan Golkar sebagai golongan fungsional. Kepentingan politik penguasa yang diwujudkan dalam satu golongan tertentu dan tidak mau disebut dengan partai politik merupakan upaya untuk

⁵³ Einar M Sitompul, 1989, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm 127.

⁵⁴ *Ibid*

melegitimasi keberadaan penguasa (Golkar) di mata rakyat. Golkar agaknya ingin meraih keuntungan psikologis bahwa dirinya bukanlah partai yang ingin memperjuangkan ideologi tertentu seperti yang terjadi pada zaman Orde Lama, di mana hal itu menjadi penyebab rapuhnya pemerintahan.⁵⁵

Menjelang Pemilu 1977, kedudukan Golkar tetap diuntungkan, karena sudah memiliki pengalaman pada Pemilu sebelumnya. Sedangkan bagi PPP dan PDI sebagai partai baru belum memiliki pengalaman dalam mengkonsolidasikan partainya. Meskipun PPP dan PDI masing-masing sebagai partai politik, tetapi harus disadari bahwa dalam tubuh PPP dan PDI terjadi konflik kepentingan, karena PPP dan PDI merupakan hasil fusi sejumlah partai politik. Untuk meraih simpati rakyat saat berhadapan dengan Golkar, maka PPP memberanikan diri dengan mengangkat Islam sebagai identitas partai berlambang Ka'bah. Dalam Pemilu 1977 tampak jelas bahwa PPP menjadi tandingan kuat bagi Golkar. Polarisasi politik itu bukan lagi antara nasionalisme sekuler melawan nasionalisme muslim seperti yang terjadi pada menjelang dan awal kemerdekaan, tetapi lebih menonjolkan antara golongan pragmatis yang mengandalkan program nyata bagi masyarakat dan golongan keagamaan yang lebih mengandalkan ikatan tradisional umat dengan agama.⁵⁶

Tabel 3 menunjukkan bahwa Golkar pada Pemilu 1977 merupakan partai yang sangat besar dan dominan. Tapi meskipun Golkar kembali menempati urutan pertama dengan suara mutlak (62,11%), namun suara Golkar menurun sebanyak 6% dari perolehan suara pada Pemilu 1971. Justru partai-partai Islam yang tergabung

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm 129

dalam PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 2,1% dari perolehan suara Pemilu sebelumnya. Sebagai tandingan atas kekuatan mayoritas Golkar menjelang Pemilu 1977, PPP berupaya menarik dukungan umat Islam dengan mengeluarkan Surat Edaran pada Januari 1977 yang dikeluarkan Rois Am PPP KH Bisri Sansuri. Surat Edaran tersebut memberikan propaganda dengan memanfaatkan hukum Islam, di mana pemilih yang beragama Islam diwajibkan hukumnya untuk memilih PPP. Bahkan isi surat itu memberikan peringatan bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk PPP dalam Pemilu 1977, dianggap telah meninggal hukum Allah.⁵⁷ Demikian halnya Golkar juga mengimbangi gerakan politik PPP dengan mengandalkan politik pencitraan melalui program pembangunan dan modernisasi. Penggunaan identitas agama oleh PPP ternyata membuahkan hasil. Meskipun Golkar kembali menempati urutan pertama dengan suara mutlak (62,11%), namun suara Golkar menurun sebanyak 6% dari perolehan suara pada Pemilu 1971. Justru partai-partai Islam yang tergabung dalam PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 2,1% dari perolehan suara Pemilu sebelumnya.⁵⁸

Tabel 3

Hasil Perolehan Kursi Partai berdasarkan Pemilu 1977

No	Uraian	Persentase Kursi
1.	Golongan Karya (Golkar)	62,11%
2.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	29,19%
3.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	8,70%

Sumber : Einar M Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm 130.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 129

⁵⁸ *Ibid*

Meningkatnya jumlah perolehan suara PPP tidak mampu memberikan motivasi tersendiri bagi PPP untuk mengembangkan suaranya pada Pemilu selanjutnya. Kemenangan yang kecil ini tidak diimbangi dengan perkembangan positif internal partai, tetapi justru sebaliknya. Perpecahan di tubuh PPP mulai meruncing, terutama terkait dengan kesepakatan dalam pembagian kursi berdasarkan Konsensus 1975 yang membagi kursi menurut perbandingan (rasio) hasil Pemilu 1971. Hasil Konsensus 1975 itu meliputi, 58 kursi untuk NU, 24 kursi untuk Parmusi, 10 kursi untuk PSII dan 2 kursi untuk Perti. Ketika perolehan kursi bertambah dari 94 kursi pada Pemilu 1971 menjadi 99 kursi pada Pemilu 1977 bukan mengakibatkan naiknya kursi NU, tetapi justru sebaliknya, jatah kursi NU dikurangi dari 58 kursi menjadi 56 kursi, sedangkan tiga partai lainnya mengalami penambahan kursi. Parmusi mendapatkan 25 kursi, PSII mendapatkan 14 kursi dan Perti mendapat jatah 4 kursi.⁵⁹

B. Latar Belakang Lahirnya PKB Tingkat Nasional

Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bisa terlepas dari campur tangan kiai NU hampir di semua daerah dan merupakan konsekuensi logis terhadap suka duka perjalanan politik NU dalam sejarahnya. Organisasi politik dibentuk bertujuan untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam Pemilu. Secara teoretis, partai politik (Parpol)

⁵⁹ *Ibid*, hlm 131

adalah organisasi yang dimaksudkan sebagai wahana partisipasi rakyat tanpa pembatasan tertentu. Untuk tujuan partisipasi tersebut Parpol mengaktifkan dan memobilisasi rakyat. Parpol juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengkompromikan aspirasi dan pendapat mereka. Parpol juga menjadi sarana bagi suksesi kepemimpinan politik secara sah atau legitimate dan damai.⁶⁰

Latar belakang lahirnya PKB ini didorong oleh banyaknya aspirasi dari warga NU mengenai pentingnya pendidikan politik agar tidak termarginalkan dalam rezim pemerintahan Orde Baru. Sesuai dengan *fiqh* politik NU bahwa kekuasaan pada hakikatnya milik Allah dan diamanahkan kepada manusia yang memiliki kemampuan untuk memikulnya dan menegakkan nilai-nilai agama serta kemaslahatan rakyat, maka pendirian partai baru tersebut merupakan sikap progresif dan lebih fleksibel NU dalam menyikapi kekuasaan. Pemurnian ajaran NU melalui *khittah 1926* tidak difahami sebagai langkah mutlak untuk mengambil jarak dengan kekuasaan. Justru kekuasaan itu harus dikawal agar tidak menimbulkan kemundharatan.⁶¹

Secara umum Khoirudin membagi sejarah perkembangan politik NU dalam lima fase atau periode. *Pertama*, merupakan masa-masa kelahiran NU hingga perkembangannya sampai menjelang kemerdekaan. *Kedua*, fase perkembangan NU antara 1942-1952, di mana NU mulai masuk pada aktivitas politik bersama kelompok-kelompok organisasi politik Islam lainnya, seperti Majelis Syura Muslimin (Masyumi) hingga akhirnya keluar dan membentuk partai baru melalui Mukhtar ke-

⁶⁰ Abdul Aziz, 2006, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 67

⁶¹ *Ibid*

19 NU di Palembang pada 1952. *Ketiga*, merupakan perjalanan NU menjadi partai politik yang mampu menjadi kekuatan terbesar ketiga pada Pemilu 1955. NU juga memiliki andil besar dalam penumpasan PKI 1965 hingga akhirnya menjadi konstestan terakhir dalam Pemilu 1971, karena sejak tahun 1973 penguasa Orde Baru melakukan penyederhanaan partai. *Keempat*, dampak penyederhanaan partai itu berakibat harus fusinya sejumlah partai Islam termasuk NU ke dalam PPP. Dalam perjalanannya NU merasa dikucilkan, hak-hak politiknya menjadi terbatas di PPP. Di samping itu tekanan berkepanjangan dari pemerintah Orde Baru membuat NU harus mengambil keputusan untuk keluar dari kancah perpolitikan Indonesia pada tahun 1984, melalui pemurnian ajaran NU yang diwujudkan dalam gerakan *khittah NU 1926*. Para politisi NU tidak hanya berafiliasi di PPP melainkan juga menyebar ke Golkar dan PDI. *Kelima*, fase terakhir ini merupakan fase di mana NU kembali merespon aspirasi dari akar rumput untuk kembali memasuki kancah perpolitikan nasional, karena peluang NU untuk mengulangi kejayaan pada Pemilu 1955 terbuka lebar.⁶²

Berdasarkan semangat *khittah 1926*, posisi NU tetap sebagai organisasi sosial keagamaan dan NU membutuhkan suatu wadah baru untuk menampung aspirasi politik warga Nahdliyin. Keputusan Muktamar ke-30 NU di Lirboyo, Kediri pada tahun 1999 menjadi tonggak bagi warga NU untuk membentuk partai politik baru. Keputusan Muktamar ke-30 itu memandnag bahwa warga NU tetap dianjurkan untuk menggunakan hak politiknya secara bebas, kritis dan rasional sesuai dengan kultur

⁶² Khoirudin, 2005, *Menuju Partai Advokasi*, Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa, hlm 4-9

dan aspirasi politik masing-masing, tetap tetap memegang prinsip *khittah 1926* dan sembilan pedoman berpolitik NU yang diputuskan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta.⁶³

Alasan-alasan pembentukan PKB ini hampir sama dengan pendirian Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. Mengutip pendapat Ahmad Syafii Maarif, pendirian MIAI dilatarbelakangi oleh usaha-usaha politik Islam waktu itu dinilai belum mantap, seperti yang diharapkan. Padahal persatuan umat amat diperlukan untuk menghadapi pemerintah kolonial (Orde Baru). Sedangkan alasan kedua lebih merujuk pada landasan spiritual tentang anjuran pentingnya persatuan Islam dan tidak bercerai berai seperti yang terkandung dalam QS Ali Imran, ayat 103.⁶⁴ Memang tidak bisa dipungkiri bahwa PKB lahir dari desakan warga NU, namun bukan berarti bahwa NU meninggalkan *khittah*-nya, karena PKB secara kelembagaan terlepas dari NU, meskipun secara struktur organisasinya sama dengan NU.

Usulan nama Parpol baru pada mulanya mencapai 39 nama yang masuk ke Pengurus Besar NU (PBNU). Dari catatan Khoirudin, usulan nama partai dari pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang terbanyak adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Selain usulan nama, juga ada usulan lambang Parpol yang didominasi oleh gambar bumi, bintang, usulan visi dan misi Parpol, AD/ART sampai pada usulan nama-nama pengurus Parpol. Salah satu usulan

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Abdul Aziz, *op. cit.*, hlm 36

yang menjadi acuan adalah Lajnah 11 Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.⁶⁵

Sebelum usulan *Lajnah* 11 Rembang masuk ke PBNU, sejumlah ulama dan tokoh NU sempat berembung di Kantor PWNU Jawa Timur, Senin 25 Mei 1998. Mereka membahas berbagai kemungkinan seputar lahirnya partai baru di lingkungan NU. Hasil pembahasan yang memakan waktu beberapa hari itu diumumkan pada *Istighasah* Akbar II di Lapangan Makodam V/Brawijaya Ahad, 31 Mei 1998. Gagasan pendirian partai baru kemudian dibawa ke forum pertemuan ulama NU di Rembang Jawa Tengah, Sabtu, 6 Juni 1998. Pada pertemuan inilah tim yang terdiri atas 11 tokoh berhasil menyelesaikan konsep pembentukan partai baru secara komprehensif. Konsep itulah yang kemudian diusulkan ke PBNU dengan nama Lajnah 11 Rembang.⁶⁶ Usulan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk tim lima yang dibantu oleh tim asistensi sebanyak sembilan orang yang bertugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Keputusan PBNU itu ditindaklanjuti oleh keputusan pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang yang membentuk tim serupa untuk menyiapkan format partai baru untuk memenuhi aspirasi warga NU. Dan akhirnya hasil musyawarah Tim Lima dan Tim Sembilan tingkat pusat adalah nama partai yang akan menjadi wadah aspirasi warga NU adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Nama Partai tersebut di deklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Ciganjur Jakarta Selatan. KH. Abdurrahman

⁶⁵ Abdul Aziz, *op. cit.*, hlm 12

⁶⁶ Abdul Aziz, *op.cit.*, hlm 13.

Wahid menjelaskan secara rinci alasan memilih nama PKB. Dalam sambutan pada acara deklarasi PKB 1998, Gus Dur menguraikan kata "kebangkitan" jelas di ambilkan dari bahasa arab "*nahdlah*". Sedangkan penggunaan kata "bangsa" menjadi pilihan daripada kata "*ummat*", *lebih jelas* Gus Dur menegaskan pilihannya demikian:

"Kita pilih yang bisa diterima oleh undang-undang, yakni 'bangsa'. Tidak ada yang bisa melarang kata bangsa, karena kata itu merupakan sesuatu yang *inhem* (menyatu) dalam kehidupan berbangsa kita. Jadi karena itulah dipilih nama Partai Kebangkitan Bangsa, karena lebih dicintai NU..."⁶⁷

Matori Abdul Jalil yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB menyatakan, yang jelas ada kesadaran mendalam di kalangan NU untuk secara riil dan terus menerus menggelorakan semangat keterbukaan dalam beragama demi tercapainya cita-cita demokrasi dan persaudaraan bangsa.⁶⁸ Masalah tersebut juga disinggung dalam pidato deklarasi PKB, bahwa partai yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. PKB lahir dari garda NU, tetapi semangat dan jiwa kebangsaannya menyatu dengan napas rakyat Indonesia. PKB berkepentingan untuk menjadi penggerak demokrasi dan pengikat simpul persaudaraan bangsa.⁶⁹ Apa yang disampaikan Matori itu tidak lain adalah pengembangan Islam inklusif yang dipahami NU. Dasar-dasar Islam inklusif, menurut Matori, akan diwariskan secara utuh dalam PKB. Partai tersebut lahir dari sebagai partai yang

⁶⁷ Abdul Aziz, *op. cit.*, hlm 16-17

⁶⁸ *Kompas*, 5 April 1999

⁶⁹ Kholid Novianto, al Chaidar (ed), 1999, *Era Baru Indonesia : Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Nur mahmudi, Matori Abdul Djalil dan Yusril Ihza Mahendra*, Cetakan I, Jakarta : pt raja grafindo Persada, hlm86-87.

inklusif dan terbuka, karena inklusifisme sudah mendarah daging di batang tubuh NU. Akar-akar demokrasi merupakan substansi ajaran agama itu sendiri. ”Kita yakin bahwa semua agama pada dasarnya membawa misi kemanusiaan, mengajarkan persaudaraan, pembelaan terhadap yang lemah, keadilan, persamaan dan sebagainya.”⁷⁰

C. Peranan NU dalam Membidani Berdirinya PKB di Klaten

Keputusan PBNU untuk membentuk format partai baru ditindaklanjuti oleh hampir semua Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) di Indonesia, termasuk di Klaten. Maka dari itu pada saat Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Tengah di Brabu Kabupaten Purwodadi menjelang tahun 1998 yang diikuti hampir semua PCNU se-Jawa Tengah itu memberikan rekomendasi agar masing-masing kabupaten/kota dibentuk partai baru atau nama baru untuk mewadahi aspirasi politik warga Nahdliyin. Sepulangnya dari Purwodadi, sejumlah ulama NU Klaten mulai melakukan konsolidasi dengan sejumlah kiai pondok pesantren di Kabupaten Klaten. Salah satu kiai yang dikenal paling kharismatik adalah KH Salman Dahlawi, Yang dibantu oleh KH Khusnun, H Bambang Suprobo, H Anas Yusuf Mahmudi dan KH Muchlis Hudaf. Kelima nama tersebut kemudian dikenal dengan nama Tim Lima yang dibantu oleh Tim Asistensi yang terdiri atas sembilan orang. Proses pembentukannya persis apa yang digariskan dari PBNU. Peranan Tim Lima dan Tim Sembilan dalam pembentukan PKB dan dalam penyebaran PKB di

⁷⁰ *Kompas*, 5 April 1999

Klaten sangat dominan. Hampir sama dengan tugas-tugas Tim Lima dan Tim Asistensi di tingkat pusat, mereka juga mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengolaborasikan tugas-tugasnya. Beberapa hasil pembahasannya tidak sedetail yang dilakukan Tim Lima dan Tim Asistensi pusat. Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, *Mabda' Siyasy* (titik tolak politik), hubungan partai politik dengan NU dan AD/ART partai diserahkan kepada kebijakan pusat. Bersamaan dengan pembahasan format partai baru, jabatan Ketua Tanfidziah PCNU Klaten juga sudah berakhir. Dalam waktu dekat ada upaya Konferensi Cabang (Konfercab) NU Klaten untuk menentukan Syuriah dan Tanfidziah PCNU Klaten untuk periode selanjutnya.⁷¹

Banyak kiai yang memprediksikan bahwa dalam Konfercab NU Klaten tersebut akan terjadi benturan di internal NU, karena adanya instruksi dari PBNU untuk membentuk partai politik. Untuk megantisipasi munculnya benturan antarwarga NU, maka ada upaya lobi-lobi dengan sejumlah kiai dan ulama NU lainnya. Hasil lobi-lobi tersebut menghasilkan suatu kesepakatan tentang pembagian kerja yang jelas antara NU di wilayah politik dengan NU di wilayah organisasi sosial keagamaan.⁷² Kesepakatan itu dibangun dengan semangat mempertahankan *khittah 1926* dengan memosisikan NU tetap dijalanannya sebagai organisasi nonpartisan, sedangkan bagi ulama dan kiai yang memiliki afiliasi ke politik supaya membentuk wadah baru di luar NU, secara struktural. Dengan keputusan tersebut maka benturan antara warga NU yang tetap berpegang teguh pada pemurnian ajaran *Alhlussunnah*

⁷¹ Wawancara dengan Drs. H. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009

⁷² Wawancara dengan Drs. H. Syamsuddin Asyrofi, M.Hum, 24 September 2008

Wal Jama'ah melalui *khittah* NU bisa diakomodasi. Demikian halnya sikap progresif kalangan NU dalam menghadapi perkembangan politik Indonesia juga bisa diakomodasi. Kesepakatan tersebut mengerucut dengan menetapkan KH Salman Dahlawi sebagai Ketua Dewan Syura DPC PKB Klaten dan Drs Bambang Suprobo sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Klaten dalam organisasi politik. Sedangkan KH Muchlish Hudaf sebagai Rais Syuriah PCNU dan Drs H. Syamsuddin sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Klaten.⁷³ Penetapan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Klaten ditegaskan dengan keluarnya Surat Keputusan DPP PKB Nomor 0333/DPP-02/A.1/II/1999 tentang Susunan DPC PKB Kabupaten Klaten Periode 1998-1999. Dalam surat tertanggal 5 Februari 1999 tersebut, DPP juga memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga partai.⁷⁴

Rumusan Tim Lima dan Tim Sembilan menjadi kesepakatan bersama di Masjid Riyadhus Sholikhin Klaten dengan nama PKB. Deklarasi PKB Kabupaten Klaten dilaksanakan di Gedung Pertemuan El-Yaumi pada pertengahan tahun 1998. Sejak deklarasi itu, sudah ada komitmen bersama antara NU dan PKB, bahwa NU akan membantu perjuangan PKB dalam pelaksanaan Pemilu-Pemilu mendatang, termasuk pada Pemilu 1999. Oleh karena lahirnya PKB tidak terlepas dari NU, maka nilai-nilai Islam inklusif yang dilakukan oleh warga Nahdliyin juga diadopsi PKB. Matori Abdul Jalil yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB

⁷³ Wawancara dengan Drs. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009. Lihat lampiran-1 dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Bomor 0333/DPP-02/A.1/II/1999 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Klaten periode 1998-1999. Lihat juga lampiran-3 tentang rencana pembagian tugas pembinaan kewilayahan Pimpinan Cabang NU Klaten yang ditandatangani Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris PC NU Klaten.

⁷⁴ Lihat lampiran 1, tentang susunan DPC PKB Klaten.

menyatakan, yang jelas ada kesadaran mendalam di kalangan NU untuk secara riil dan terus menerus menggelorakan semangat keterbukaan dalam beragama demi tercapainya cita-cita demokrasi dan persaudaraan bangsa.⁷⁵ Masalah tersebut juga disinggung dalam pidato deklarasi PKB, bahwa partai yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. PKB lahir dari garda NU, tetapi semangat dan jiwa kebangsaannya menyatu dengan napas rakyat Indonesia. PKB berkepentingan untuk menjadi penggerak demokrasi dan pengikat simpul persaudaraan bangsa.⁷⁶

Kendati PKB sudah dideklarasikan, tugas-tugas Tim Lima dan Tim Sembilan masih belum usai. Mereka masih memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepengurusan PKB sampai ke tingkat kecamatan atau Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC). Anggota Tim Lima dan Tim Sembilan mulai menyebar ke sejumlah wilayah basis NU untuk mencari figur yang bisa ditempatkan dalam kepengurusan PKB di tingkat anak cabang (Pimpinan Anak Cabang). Tim tersebut berhasil membentuk kepengurusan PAC di 26 kecamatan dalam waktu singkat untuk membantu pergerakan politik PKB. Beberapa kecamatan yang menjadi basis masa PKB Klaten di antaranya, Kecamatan Juwiring, Gantiwarno, Karangnongko, Ceper, Jogonalan, Prambanan, Ngawen, Manisrenggo, Kemalang, Karanganom, Tulung, Delanggu, Wonosari, Pedan dan Trucuk.⁷⁷

⁷⁵ *Kompas*, 5 April 1999

⁷⁶ Kholid Novianto, al Chaidar (ed), 1999, *Era Baru Indonesia : Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Nur mahmudi, Matori Abdul Djalil dan Yusril Ihza Mahendra*, Cetakan I, Jakarta : pt raja grafindo Persada, hlm86-87.

⁷⁷ Lihat lampiran-2 tentang daftar surat keputusan DPC PKB Kabupaten Klaten tentang Susunan PAC dan Pengurus Ranting PKB.

Seperti dalam pembentukan PAC di Kecamatan Tulung, tiga tokoh anggota Tim Lima dan Tim Asistensi H Bambang Suprobo, H Anas Yusuf Mahmudi dan M Sadzili AR mendatangi salah satu tokoh PPP, KH Ida Royani untuk diajak bergabung dengan PKB. Tawaran tersebut ternyata disambut baik dan KH Ida Royani diangkat menjadi Ketua Dewan Tanfidz PAC Kecamatan Tulung.

”Ketiga tokoh itu mendatangi saya untuk mengajak bergabung dan sosialisasi tentang PKB. Saya kemudian mengumpulkan anggota pengajian untuk mendengarkan maksud kedatangan mereka. Sebelumnya di Tulung belum ada pondok pesantren. Setelah pertemuan itu di Tulung sudah terbentuk PAC PKB dan saya sendiri juga mulai mendirikan pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Kyai Ageng Selo, tepatnya di Desa Selogringging, Kecamatan Tulung.”⁷⁸

Sama halnya ketika pendirian PKB di kecamatan Juwiring, NU yang melalui Tim asistensinya mensosialisasikan PKB beserta visi dan misinya. Dari pensosialisasian tersebut MWC NU Juwiring di minta untuk membantu pendirian dan pembentukan pengurus PKB di tingkat Kecamatan (PAC) dan Desa (Pimpinan Ranting) yang ada di Juwiring. Pada saat itu sosialisasi berlangsung di kediaman Bp. Walidi, BA Desa Juwiran.⁷⁹

D. Garis Perjuangan dan Struktur Organisasi PKB

PKB yang dipimpin tokoh NU asal Salatiga, Matori Abdul Jalil merupakan partai yang terbuka untuk anggota masyarakat di luar NU, baik menjadi anggota atau pengurus partai. Matori menggarisbawahi bahwa PKB ditujukan untuk seluruh bangsa tanpa terkecuali, yakni untuk mewujudkan Indonesia baru yang lebih adil,

⁷⁸ Wawancara dengan Ketua Dewan Tanfidz PAC PKB Kecamatan Tulung, KH Ida Royani, 29 Mei 2009.

⁷⁹ Wawancara dengan Bp. Walidi, BA, Ketua MWC NU Juwiring, 30 September 2008

demokratis dan egaliter.⁸⁰ Kritik pedas kepada pemerintah dari mantan Sekretaris Jenderal PPP itu sering muncul di media massa. Kritik yang disampaikan bercorak struktural dan sering diarahkan kepada struktur dan peran lembaga-lembaga negara. Salah satu kritik yang dilotarkan pada masa pemerintahan Habibie terlihat saat menanggapi kerusuhan Ambon yang menelan korban meninggal dunia sampai puluhan orang. Konflik tersebut lebih disebabkan pada ketidaksanggupan pemerintah menjamin dan menegakkan keamanan.

Sikap politik PKB yang dicerminkan Ketua Umum PKB Matori Abdul Jalil ini menunjukkan garis demarkasi perbedaan antara PKB dengan partai-partai berbasis massa tradisional umat Islam lainnya. PKB lebih memilih tidak mencantumkan Islam sebagai asas partai, seperti yang dilakukan partai lain seperti PPP yang mengklaim memiliki dukungan massa dari NU. Keengganan PKB untuk tidak mencantumkan Islam sebagai asas partai tidak menimbulkan ketakutan akan kehilangan basis massa. PKB justru berniat memperluas basis massanya ke golongan di luar NU.⁸¹ Untuk merealisasikan semangat sebagai partai terbuka, PKB dibangun di atas sepuluh prinsip dasar perjuangan;⁸²

1. Partai bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi dan dipadukan dengan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keterbukaan, kemerdekaan,

⁸⁰ Hairus Salim HS, dkk, 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta : LKiS, 1 Mei, hlm 204

⁸¹ *Ibid*, hlm 205-206.

⁸² Program-program PKB itu sebagian besar diambil dari buku *Garis Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa*, terbitan DPP PKB dan dikutip dari Hairus Salin HS, dkk, 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta : LKiS, 1 Mei hlm207-208.

kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, nondiskriminasi dan kesetaraan gender.

2. PKB merupakan partai politik (Pарpol) yang menjunjung tinggi etika dan moralitas yang bersumber pada spiritualitas kebangsaan yang autentik Indonesia untuk mewujudkan kebangsaan yang lebih manusiawi dan beradab, serta menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia yang secara proaktif melakukan dan mendorong kerja sama antarbangsa untuk mewujudkan tata dunia baru yang lebih adil, aman dan sejahtera.
3. PKB merupakan Parpol yang mengakui dan menjaga kemajemukan masyarakat dan bangsa dalam berbagai aspeknya.
4. PKB adalah Parpol yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.
5. PKB merupakan Parpol yang berjuang menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat.
6. PKB merupakan Parpol yang bekehendak menciptakan masyarakat sipil yang terbuka, mandiri dan kuat berdasarkan persamaan, perdamaian, persatuan dan persaudaraan.
7. PKB adalah Parpol yang memperjuangkan adanya supremasi hukum berdasarkan pada penghargaan dan penghormatan terhadap HAM.
8. PKB merupakan Parpol yang secara tegas menolak, anti dan menentang kesewenang-wenangan, kekerasan, kediktatoran, totalitarisme, rasialisme, fasisme dan diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya.

9. PKB adalah Parpol yang berjuang menciptakan kemandirian ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sumber daya alam, pertanian dan maritim.
10. PKB merupakan Parpol yang memiliki kepedulian yang mendalam pada persoalan-persoalan dunia yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada eksistensi manusia dan kemanusiaan.

Selain 10 prinsip dasar perjuangan tersebut, PKB juga merumuskan program perjuangan partai, terutama untuk menghadapi Pemilu 1999. Semua program perjuangan PKB menyangkut hampir semua aspek strategis yang dibutuhkan negara dan masyarakat. Program perjuangan PKB itu meliputi bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, agama, pertahanan negara, politik luar negeri, buruh, tana, lingkungan dan perempuan.

Struktur organisasi PKB hampir sama dengan struktur organisasi NU, hanya namanya yang membedakan. Posisi Syuriah di PCNU Klaten kedudukannya setara dengan Dewan Syura di PKB. Demikian halnya kedudukan Tanfidziah di PCNU juga sama dengan Dewan Tanfidz di PKB. Secara kelembagaan NU dan PKB merupakan organisasi yang terpisah, meskipun memiliki akar yang sama. Berikut bagan struktur organisasi PKB Kabupaten Klaten dan susunan kepengurusan pada tahun 1999.⁸³

Pengurus Dewan Syura DPC PKB Klaten

Ketua Dewan Syura : KH M Salman Dahlawi

Wakil Ketua : H.M. Husnus HS

⁸³ Wawancara Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Klaten Bambang Suprobo, 9 September 2009.

Wakil Ketua : H Rahmat Bc. Hk
Sekretaris : Drs. H. Anas Yusuf Mahmudi
Wakil Sekretaris : M. Nur Ali Mahmud

Pengurus Dewan Tanfidz DPC PKB Klaten.

Ketua Dewan Tanfidz : Drs. Bambang Suprobo M.Hum
Wakil Ketua : Drs H.A. Mufrod T.M.
Wakil Ketua : Mujiburrahman
Sekretaris Dewan Tanfidz : M. Sadzili AR
Wakil Sekretaris : Drs. Mahmud Yusuf
Wakil Sekretaris : H. Hanif Wahyudi
Bendahara : H. Zarkasyi
Wakil Bendahara : H. Sri Widodo

Sumber : Lampiran Surat Keputusan DPP PKb Nomor 0333/DPP-02/A.1/II/1999 tentang Susunan DPC PKB Kabupaten Klaten 1998-1999 dan Laporan Pertanggungjawaban DPC PKB Kabupaten Klaten 1998-2002, hlm 4.

Dewan Syura merupakan dewan penasehat dalam PKB, sedangkan dewan tanfidz adalah merupakan pengurus harian di PKB. Dewan Syura biasanya meliputi para kiai peseantren atau tokoh – tokoh politik NU, para sesepuh NU. Sedangkan dewan tanfidz biasanya meliputi para tokoh – tokoh politik NU yang dianggap masih masih dinamis, dan berintelektual tinggi. Dewan Syura tersebut biasanya dimintai pertimbangan dari Dewan Tanfidz ketika ada program-program yang direncanakan oleh para Dewan Tanfidz, dan harus mendapat restu dari Dewan Syura. Apabila ada program-program atau rencana yang tidak mendapat restu dari Dewan Syura maka

tidak boleh dilaksanakan. Hal tersebut juga sama dengan halnya di struktur organisasi NU, bedanya hanya jika di PKB Dewan Syura dan Dewan Tanfidz, sedangkan di NU Dewan Syuriyah dan Dewan Tanfidziyah.



BAB IV

PERANAN KIAI NU DALAM KESUKSESAN PKB PADA PEMILU 1999 DI KLATEN

Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan reformasi yang telah berjalan. Jika mengacu pada tahapan Pemilu lima tahunan, mestinya Pemilu dilaksanakan pada tahun 2002, yakni lima tahun setelah penyelenggaraan Pemilu 1997. Percepatan penyelenggaraan Pemilu selama tiga tahun ini sebagai dampak atas jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto dan meluasnya aksi demonstrasi para mahasiswa dan massa rakyat yang menuntut perubahan-perubahan besar dan mendasar dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.⁸⁴

Kegagalan pembangunan di bidang hukum, politik, pemerintahan dan ekonomi disertai dengan krisis moneter, mengakibatkan jatuhnya nilai tukar rupiah secara dratis pada pertengahan Juli 1997 dari Rp 2.300/\$ menjadi Rp 10.000/\$. Bahkan pada puncak krisis moneter angka rupiah jatuh menjadi Rp 16.000/\$. Kondisi tersebut membawa respon yang luar biasa dari kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan elemen masyarakat lainnya untuk memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Kelompok elemen masyarakat ini juga mendesak diselenggarakannya percepatan Pemilu, karena Pemilu 1997 dinilai tidak sah dan

⁸⁴ Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999*, hlm 12.

tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Di samping itu, juga terdapat tuntutan bagi restrukturisasi politik, masyarakat menginginkan kebebasan mendirikan partai politik (Parpol) untuk mengikuti Pemilu.⁸⁵

Kebebasan politik sebagai hasil dari perubahan situasi ditandai dengan munculnya partai-partai politik, sekaligus menandai restrukturisasi politik nasional. Tidak kurang dari 141 Parpol terbentuk dan mendesak supaya dilakukan perubahan Undang-undang Partai Politik yang sebelumnya membatasi hanya tiga organisasi sosial politik (Orsospol), yaitu UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar. Dalam waktu singkat lahirlah UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sehingga keberadaan partai-partai secara massal itu sudah memiliki landasan hukum. Selain UU tentang Parpol, juga lahir UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD sebagai satu paket dalam UU politik baru.⁸⁶

Sebanyak 141 Parpol itu tentunya tidak semua bisa mengikuti Pemilu 1999, sehingga dibutuhkan tim khusus untuk melakukan seleksi dan verifikasi terhadap semua Parpol yang mendaftarkan diri ke Lembaga Pemilihan Umum. Hasil seleksi dan verifikasi tersebut menyatakan dari 141 Parpol yang ada, hanya 48 Parpol yang berhak mengikuti Pemilu 1999.⁸⁷ Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/1999 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*, hlm 14.

1999 tertanggal 19 Maret 1999, PKB merupakan partai peserta Pemilu dengan nomor urut ke-35.⁸⁸

Selain itu ada pembatasan-pembatasan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam organisasi politik, yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5/1999 dan disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa batasan bagi PNS untuk terlibat dalam organisasi politik antara lain, pemberhentian PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik (Parpol). PNS bisa diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan melepaskan keanggotaannya dan atau kepengurusannya dalam Parpol.⁸⁹

A. Konflik Partai Dalam Tahapan Pemilu 1999 di Klaten

Sistem Pemilu yang diatur dalam UU menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar daerah tingkat II dan kecamatan. Dalam penjabarannya, sistem tersebut mengadopsi pemikiran-pemikiran sistem distrik yang tidak jelas parameternya yang justru banyak menimbulkan kontroversi dan ketidakjelasan terhadap sistem yang dianut. Dengan sistem itu, maka penentuan daerah pemilihan (Dapil) dibagi menjadi tiga, yakni;

1. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya adalah daerah tingkat I.
2. Untuk pemilihan anggota DPRD I, daerah tingkat I merupakan satu daerah pemilihan.

⁸⁸ Lihat lampiran-6 tentang Keputusan KPU No 05/1999 lengkap beserta tanda gambar 48 partai politik peserta Pemilu 1999. Lihat juga Impiran-9 tentang profil PKB.

⁸⁹ *Ibid*

3. Untuk pemilihan anggota DPRD II, daerah tingkat II merupakan satu daerah pemilihan.⁹⁰

Ada pembagian peran dalam organisasi penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di daerah. Setidaknya ada dua organisasi penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pembuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, mengambil keputusan yang bersifat strategis dan berpengaruh langsung bagi penyelenggaraan Pemilu. Organisasi penyelenggara Pemilu selanjutnya adalah Panitia Pemilihan Indonesia/Daerah sebagai lembaga teknis dari kebijakan-kebijakan yang diambil KPU. Keputusan-keputusan yang diambil Panitia Pemilihan Indonesia/Daerah ini bersifat operasional.⁹¹

Atas dasar itu Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat II Kabupaten Klaten beranggotakan wakil-wakil Parpol peserta Pemilu yang ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Parpol di Kabupaten Klaten dan tiga orang wakil pemerintah yang ditetapkan Bupati Klaten.⁹² Untuk menjalankan tugasnya PPD Kabupaten Klaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II meliputi,

1. Membantu dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

⁹⁰ Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999*, hlm 275

⁹¹ *Ibid*

⁹² Daftar anggota Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat II Kabupaten Klaten lihat lampiran-8

2. Menetapkan nama-nama calon anggota DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
3. Melaksanakan Pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di daerahnya.
4. Menghitung suara hasil Pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
5. Membantu tugas-tugas PPD I.⁹³

Hampir setiap tahapan Pemilu 1999 mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, termasuk penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Klaten. KPU menetapkan ada 10 tahapan dalam pelaksanaan Pemilu 1999, mulai dari tahapan persiapan yang berupa persiapan kelembagaan penyelenggara Pemilu dan partai politik sampai pada tahapan pelantikan anggota DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.⁹⁴

Dari sekian banyak tahapan Pemilu, setidaknya ada tiga tahapan Pemilu yang memicu potensi konflik di daerah maupun tingkat nasional, yakni tahapan pemutakhiran data, tahapan kampanye dan penetapan kursi berdasarkan perolehan suara. Potensi konflik terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Klaten terjadi menjelang dan saat dilaksanakannya kampanye. Berdasarkan tahapan di KPU, pelaksanaan kampanye itu ditetapkan sejak 19 Mei 1999 sampai 4 Juni 1999. Masa kampanye Pemilu 1999 merupakan bagian dari arus reformasi yang mengekspresikan euforia kebebasan masyarakat. Masa kampanye Pemilu 1999 praktis hanya berjalan

⁹³ Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999*, hlm 275

⁹⁴ *Ibid*

selama 14 hari untuk 48 Parpol peserta Pemilu. Berbeda dengan masa kampanye pada Pemilu-Pemilu sebelumnya yang sampai memakan waktu 1-3 bulan. Masa kampanye Pemilu 1955 selama 3 bulan untuk 118 peserta Pemilu yang terdiri atas Parpol, organisasi massa dan perorangan. Masa kampanye itu mengalami penyusutan pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yakni pada Pemilu 1971. Lembaga penyelenggara Pemilu memutuskan masa kampanye Pemilu 1971 selama 2 bulan dengan peserta 9 Parpol dan 1 Sekretaris Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar). Sementara masa kampanye Pemilu dari tahun 1987 sampai dengan 1997 selama 1 bulan untuk 3 organisasi sosial politik (Orsospol) peserta Pemilu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).⁹⁵

Bila dikomparasikan antara masa kampanye Orde Baru dengan jumlah peserta Pemilu yang hanya 3 Orsospol dengan masa kampanye pascareformasi dengan 48 Parpol, maka potensi konflik dan gesekan antar peserta kampanye lebih besar terjadi pada masa kampanye pascareformasi. Kendati KPU sudah mengkondisikan Parpol melalui penjadwalan kampanye secara ketat, ternyata tidak mampu mengantisipasi gesekan fisik antarpeserta kampanye di Kabupaten Klaten. Gesekan fisik antara pendukung Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pendukung PPP terjadi di beberapa daerah, bahkan masa kampanye belum dimulai peristiwa bentrokan antara kedua pendukung partai itu sudah terjadi.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid* \hlm 276

⁹⁶ *Ibid*

Jika kembali pada teoretisasi Geertz⁹⁷, konflik yang terjadi dalam Pemilu 1999 lebih menunjukkan faktor fundamental yang membuat karakter varian santri dan abangan menonjol di antara partai-partai peserta Pemilu 1999. Artinya, tampilnya Partai Golkar dengan paradigma baru yang terlepas dari birokrasi dan ABRI, membuat varian priyayi mencair. Dengan demikian watak varian santri dan abangan saja yang mengemuka dan berkompetisi secara diagonal. Konflik politik yang terjadi di Kabupaten Klaten menjelang Pemilu 1999 menunjukkan adanya ketegangan politik pada karakter varian santri, sedangkan karakter abangan dan priyayi tidak menunjukkan konflik yang berarti.⁹⁸

Berdasarkan hasil evaluasi pelanggaran dan kecurangan Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten, sebanyak 9 orang satuan tugas (Satgas) PPP dihadang dan dianiaya dengan senjata tajam oleh sekitar 20 orang yang menggunakan dua kendaraan bertanda PAN. Peristiwa penghadangan massa yang diduga pendukung PAN itu terjadi di Desa Durenan, Kecamatan Juwiring, Klaten pada 4 April 1999 atau sekitar 1,5 bulan sebelum dimulainya masa kampanye. Peristiwa itu mengakibatkan lima orang korban luka-luka, dua orang di antaranya di rawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Klaten dan tiga orang lainnya menjalani rawat jalan. Bentrokan kedua massa pendukung Parpol tersebut juga terjadi di wilayah Kecamatan Jatinom⁹⁹, Desa Meger

⁹⁷ Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.

⁹⁸ Imam Tholikhah, 2003, *Anatomi Konflik Politik Indonesia, Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan II, hlm 231

⁹⁹ Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999*, hlm 148-150.

Klaten kota, Kecamatan Cokro, Pedan, Klaten Utara, Trucuk dan Ceper.¹⁰⁰ Bentrokan massa PPP dengan warga di Ceper pada 2 Juni 1999 berdampak pada batalnya pelaksanaan kampanye PKB putaran terakhir yang rencananya dilaksanakan di Lapangan Kalikotes pada Kamis tanggal 3 juni 1999. Ketua DPC PKB Klaten Bambang Suprobo mengeluarkan surat resmi pemberitahuan kepada massa PKB agar tidak melakukan kampanye putaran terakhir dan kegiatan kampanye itu diganti dengan kegiatan istighasah di wilayah kecamatan dan desa masing - masing.¹⁰¹

Sebab utama kekerasan fisik dalam kampanye di Kabupaten Klaten adalah keterlibatan masyarakat luas, karena kompetisi terbuka lebar. Intimidasi kepada pemilih merupakan bentuk korupsi politik yang berdampak pada kekerasan politik, karena intimidasi itu bagian dari proses kampanye untuk memenangkan kompetisi dalam Pemilu. Arbi Sanit membedakan bentuk kekerasan politik dalam Pemilu terdiri atas, perusakan fasilitas fisik Pemilu, pemukulan, pembunuhan lawan politik dan huru hara politik.¹⁰² Dalam literatur yang dikutip Arbi Sanit dari tulisan Fred. R van der Mehden (1997), tipe atau bentuk kekerasan politik meliputi kekerasan primordial yang terjadi di antara kelompok masyarakat, agama, suku, ras dan daerah dan bahasa. Kedua, tipe kekerasan politik revolusioner yang dimotori oleh kaum pembaharu radikal dan fanatik. Ketiga, kekerasan kup oleh kelompok pengambil alih paksa kekuasaan negara. Kekerasan selanjutnya, kekerasan separatisme oleh kelompok-kelompok pemberontak yang berusaha memisahkan diri dari wilayah negaranya dan

¹⁰⁰ Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999*, hlm 147-152

¹⁰¹ *Bernas*, 3 Juni 1999. Lihat lampiran-14 tentang berita *PKB Klaten batal kampanye*.

¹⁰² Arbi Sanit, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I April, hlm 86.

kekerasan atas isu yang dilakukan oleh para pendukung atau penolak isu tertentu dalam masyarakat. Kekerasan politik yang terjadi pada menjelang dan pelaksanaan kampanye di Klaten masuk dalam kategori kekerasan politik atas isu. Menurut Arbi Sanit, motif kekerasan politik dibedakan atas motif bela diri, membalas perlakuan tidak adil lawan (politik) yang dipandang tidak benar, membina persatuan internal dan alternatif terhadap jalan damai. Kampanye massal masih merupakan pilihan terbaik, dilihat dari kepentingan kontestan dan masyarakat luas. Sebab lembaga kampanye lain seperti media massa, konvensi partai dan hubungan pribadi belum dikembangkan secara sistemik.¹⁰³

Kekerasan politik yang terjadi antara PAN dan PPP di beberapa wilayah di Klaten dikategorikan pada kekerasan politik yang didasarkan atas isu yang berkembang. Dari hasil Pemilu legislatif tahun 1999 di Kabupaten Klaten, perolehan suara kedua partai itu secara umum tidak menunjukkan kompetisi yang signifikan. Kendati demikian persaingan kedua partai tersebut untuk merebut suara dari masyarakat cukup kentara di wilayah Kecamatan Juwiring, di mana PAN memiliki perolehan suara 3.652 suara, sedangkan PPP mampu mengungguli PAN dengan perolehan sebesar 3.743 suara. Konflik PAN dan PPP lazimnya terjadi cukup hebat di wilayah Kecamatan Juwiring. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa konflik kedua partai yang berangkat dari massa agama ini terjadi di daerah-daerah, di mana posisi PPP

¹⁰³ *Ibid*, hlm 87-88.

menjadi minoritas, seperti di daerah-daerah Klaten Utara, Klaten Tengah, Jatinom, Ceper dan Pedan.¹⁰⁴ Dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5

Perolehan suara lima partai besar di daerah konflik PAN dan PPP

Partai	Jatinom	Ceper	Pedan	Klaten Utara	Klaten Tengah	Juwiring	Jumlah
PDIP	17.051	17.980	16.699	12.611	13.293	15.849	93.483
PAN	4.509	5.288	2.588	5.044	3.599	3.652	24.680
GOLKAR	4.043	3.021	2.684	2.790	3.768	5.294	21.600
PKB	904	5.148	1.247	694	-	1.518	9.511
PPP	1.843	1.355	1.424	833	1.312	3.743	10.510

Sumber : Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Klaten Tahun 1999.

Dilihat dari suara kumulatif lima partai di enam kecamatan yang banyak terjadi konflik antarpolitik menjelaskan, posisi PAN rata-rata berada pada urutan kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun tidak dipungkiri bahwa PAN sempat berada di bawah Partai Golkar terutama di Kecamatan Pedan, Klaten Tengah dan Juwiring, bahkan PAN di Juwiring berada di urutan keempat di bawah PPP.

Partai Golkar yang merupakan mantan partai penguasa pada masa Orde Baru tidak mampu bertahan pada Pemilu 1999. Meskipun massa pendukung partai berlambang pohon beringin ini memiliki militansi massa yang kuat, Partai Golkar harus mengakui kekalahannya terhadap PDIP dan PAN di Kabupaten Klaten. Sebagai partai massa, di internal PDIP tidak memunculkan konflik yang berkepanjangan. Demikian pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga tidak terjadi konflik

¹⁰⁴ Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999*, hlm 147-152

yang serius baik secara internal maupun secara eksternal. Kekalahan Partai Golkar itu bukan semata-mata adanya perubahan mendasar di negeri ini melalui proses reformasi, sehingga banyak kader partai yang masuk menjadi kader partai baru. Kekuatan Partai Golkar dari hasil Pemilu 1999 merupakan kekuatan yang riil dari massa pendukung Partai Golkar atau massa rasional. Sedangkan massa pendukung PDIP masih terpengaruh pada figur Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Berbeda dengan massa pendukung PKB yang sama-sama memiliki figur karismatik, seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebagian besar warga Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih tetap bertahan sebagai kader rasional Partai Golkar, karena sudah tertanam sejak masa Orba. Kondisi tersebut memiliki potensi konflik antara PKB dan Partai Golkar, tetapi konflik kedua partai tersebut tidak pernah terjadi, karena NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk berafiliasi politik (inklusif), walaupun jelas NU telah memiliki wadah aspirasi politik warga Nahdliyin, yaitu PKB.

Persoalan politik yang hampir memicu konflik adalah rencana kedatangan Ketua umum Partai Golkar Ir Akbar Tanjung ke Klaten untuk menghadiri apel tani Partai Golkar di GOR Gelarsena Klaten. Kedatangan Akbar Tanjung itu ditentang sejumlah pengurus partai, terutama PAN dan PKB. Sekretaris DPC PKB Klaten M Sadzili AR dan Wakil Ketua DPD PAN Klaten Fachrudin Eka Cahyono pada 5 Mei 1999 menyatakan, kedatangan tokoh Partai Golkar itu akan memicu konflik. Tetapi bagi Ketua DPC PPP Klaten H Mardiyono Martono Puspito BA menilai kedatangan

Akbar Tanjung ke Klaten tidak perlu dihujat.¹⁰⁵ Akhirnya kunjungan Akbar Tanjung dibatalkan dan dialihkan ke Jawa Timur.¹⁰⁶

Salah satu kesuksesan NU dan PKB pada Pemilu 1999 di Klaten adalah selama dalam tahapan kampanye simpatisan PKB sama sekali tidak melakukan konflik baik *intern* maupun *ekstern* dan juga tidak melakukan pelanggaran selama kampanye. Hal tersebut lebih disebabkan oleh sikap *tawadlu*'nya para warga NU dan PKB terhadap Kiai NU.¹⁰⁷

B. Peranan Kiai NU Dalam Mobilisasi Massa di Klaten

Seiring dengan semakin rasionalnya perilaku pemilih warga NU, maka untuk memobilisasi warga NU ke PKB di Klaten tergantung pada kemampuan PKB sendiri dalam menawarkan program dan kerangka kerja partai yang memberikan banyak kemasalahatan rakyat serta peranan figur karismatik tokoh di daerah untuk mempengaruhi warga NU dan masyarakat pedesaan untuk memilih PKB. Keberadaan partai-partai lain yang berangkat dari basis massa NU dapat mempengaruhi kesuksesan perolehan suara dalam Pemilu bagi PKB, seperti Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang memiliki figur KH Yusuf Hasyim yang tidak lain paman Gus Dur, Partai Nahdlatul Ummat (PNU) yang didirikan KH Syukron Makmun dan Partai Sunni serta 10 partai Islam yang juga mengambil suara dari warga Nahdliyin.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Bernas*, 7 Mei 1999 dan lihat lampiran-14 tentang berita *PAN dan PKB menolak, PPP oke*.

¹⁰⁶ *Bernas*, 8 Mei 1999 dan lihat lampiran-14 tentang berita *Akbar batal ke Klaten*.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Drs. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009.

¹⁰⁸ Kacung Marijan, "*Ketika PKB Ingin Menjadi Partai Besar*" dalam Hairus Salim HS,dkk,1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta: LKiS, hlm 231

Keberadaan partai-partai tersebut tidak mampu menyurutkan pemimpin PKB untuk terus mengembangkan PKB dengan menerapkan Islam inklusif. Modal Islam inklusif yang diamalkan NU bagi PKB membawa harapan besar, bahwa PKB akan menjadi partai yang kuat, bukanlah partai massa melainkan partai kader yang diidam-idamkan Matori Abdul Jalil pada zaman Orde Baru.¹⁰⁹ Pemikiran dan sikap keagamaan yang inklusif tersebut ditegaskan Matori menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. "Yang jelas ada kesadaran mendalam di kalangan NU untuk secara riil dan terus menerus memberikan semangat keterbukaan dalam beragama demi mencapai cita-cita demokrasi dan persaudaraan bangsa."¹¹⁰ Prof Dr Alwi Shihab saat berkampanye di Stadion Trikoyo Klaten memberikan gambaran bahwa PKB juga dikenal di luar negeri. Prestasi PKB itu dimanfaatkan tokoh PKB itu untuk meraih simpati masyarakat. Alwi juga menjanjikan akan meneruskan perjuangan para wali.¹¹¹

Keberadaan figur karismatik yang memiliki otoritas sebagaimana dijelaskan Max Weber¹¹² dalam teori otoritasnya akan mampu mendulang perolehan suara yang besar bagi PKB. Dalam Pemilu yang menggunakan sistem distrik pada tahun 1999, PKB Kabupaten Klaten lebih mengedepankan peran figur politisi yang memiliki otoritas untuk memobilisasi massa daripada menjual sosok partai. Peran figur politik yang dimaksud tidak lain adalah para kiai-kiai yang memiliki loyalitas untuk membesarkan PKB. Selain mengandalkan peran figur politisi yang berkualitas, PKB

¹⁰⁹ *Kompas*, 9 Mei 1994.

¹¹⁰ *Kompas*, 5 April 1999

¹¹¹ *Bernas*, 31 Mei 1999, dan lihat lampiran-14.

¹¹² Dennis Wrong (Ed), 2003, *Max Weber—Makers of Modern Social Sciens (Series)*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1970. Buku tersebut diterjemahkan A Asnawi, *Max Weber Sebuah Khazanah*, Yogyakarta : Ikon Terlitera, Cetakan I, April.

masih tetap mempertahankan sumber-sumber rekrutmen lama, yaitu memanfaatkan hubungan warga dengan NU dan hubungan *patron-klien* antara kiai dan santri. Konsep otoritas yang dimaksudkan Max Weber untuk melihat sejauh mana peran figur dalam menghantarkan PKB menjadi partai pemenang keempat dalam Pemilu 1999 di Klaten, adalah adanya ketaatan secara sukarela dari masyarakat NU kepada PKB dan masyarakat di luar NU sebagai realisasi atas inklusifitas PKB. Konsep otoritas Weber menunjukkan kontrol imperatif di mana tidak ada cara mudah untuk melarikan diri, namun kriteria utamanya adalah kepatuhan sukarela. Oleh karenanya konsep otoritas tradisional dan otoritas kharismatik Weber yang dinilai tepat untuk menjelaskan peranan kiai dalam kesuksesan PKB pada Pemilu 1999 di Klaten¹¹³. Otoritas tradisional menurut Weber adalah otoritas yang dilegitimasi oleh kesucian tradisi. Tatanan sosial dalam otoritas tradisional dipandang sebagai suci, abadi dan tidak bisa dilanggar. Umumnya otoritas tradisional cenderung mengabadikan *status quo* dan tidak cocok untuk perubahan sosial. Otoritas Kharismatik mendefinisikan seorang pemimpin dan misinya sebagai diilhami Tuhan atau kekuatan supranatural. Otoritas kharismatik ini biasanya bertindak sebagai kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional.¹¹⁴

Lahirnya PKB di Kabupaten Klaten tidak bisa lepas dari peranan kiai pondok pesantren (Ponpes), maka secara otomatis gerakan membesarkan nama PKB juga selalu melibatkan peranan kiai. Banyak Ponpes di Klaten yang mendukung perjuangan PKB, baik Ponpes dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Para

¹¹³ *Ibid*, hlm 233-234.

¹¹⁴ *Ibid*.

santri-santri dikondisikan kiai untuk menyebarkan ajaran Ponpes ke kelompok-kelompok pengajian di tingkat dusun, desa sampai ke tingkat kecamatan. Kedekatan tokoh masyarakat terhadap figur kiai Ponpes biasanya disegani anggota masyarakat setempat, karena kedekatan dengan seorang kiai tersebut dianggap memiliki ilmu agama dan kharismatik. Dengan modal tersebut, para tokoh masyarakat sering ditunjuk pengurus PKB duduk di pimpinan partai di tingkat bawah, minimal di tingkat kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC). Keberadaan PAC PKB ini juga mendapatkan dukungan dari MWC NU di tingkat kecamatan yang biasanya didominasi oleh kiai-kiai Ponpes lokal.¹¹⁵

Peranan kiai pondok pesantren atau NU dalam mendewasakan PKB dalam Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten memang cukup dominan, namun masih terbatas pada masukan dan himbauan, yang nantinya merujuk pada memobilisasi massa. Gerakan politik yang dilakukan sejumlah kiai NU untuk menyukseskan PKB di Klaten sifatnya tradisional dan konservatif. Mereka memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian kampung atau desa. Walaupun begitu hal tersebut mampu mendukung perolehan suara PKB secara kumulatif pada Pemilu 1999 di Klaten berada di posisi keempat.¹¹⁶ Selain itu cara yang dilakukan PKB dalam memobilisasi massa adalah dengan menugaskan para Caleg (Calon Legislatif) PKB Klaten yaitu dengan cara Turba (Turun Kebawah), artinya para Caleg langsung datang ke daerah – daerah, baik di tingkat PAC maupun tingkat Ranting, sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang di lakukan

¹¹⁵ Wawancara dengan Drs. Syamsuddin, Asyofi, M.Hum, 24 September 2009.

¹¹⁶ Wawancara dengan Drs. Syamsuddin, Asyofi, M.Hum, 24 September 2009.

Sekretaris DPC PKB Klaten yang juga Caleg PKB Klaten tahun 1999, saat berkampanye di Desa Klepu Kecamatan Klaten.¹¹⁷

Pada waktu itu kedatangan saya di sambut dengan baik oleh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut saya menyampaikan tentang PKB dan kemudian saya juga menyampaikan visi misi saya sebagai Caleg PKB di Klaten.¹¹⁸

Selain dengan Turba cara berkampanye yang di lakukan adalah dengan membagikan gambar PKB dan foto Caleg. Seperti yang dilakukan pada saat kampanye PKB putaran keempat di Lapangan Dukuh Karangasem, Desa Ngarang, Kecamatan Jogonalan pada 22 Mei 1999 M. Sadzili AR membagi-bagikan gambar parpol PKB dan foto Caleg PKB.¹¹⁹

Gerakan-gerakan politik yang dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten bermula secara terselubung lewat kegiatan kelompok pengajian. Kelompok pengajian yang mati suri dihidupkan kembali dengan membuat wadah baru berupa majelis dzikir di tingkat ranting (kelurahan/desa) yang dipelopori oleh para kiai *langgar*, kiai yang memiliki basis massa atau jamaah di tingkat musala atau *langgar* dan masjid. Gabungan PAC PKB dan MWC NU ini juga menawarkan program-program pendidikan, melalui upaya menghidupkan kembali sekolah-sekolah berlabel Ma'arif untuk menarik simpati masyarakat, tidak hanya masyarakat dari kalangan NU malainkan juga di luar NU.¹²⁰

¹¹⁷ Wawancara dengan M. Sadzili AR, 7 Desember 2009.

¹¹⁸ Wawancara dengan M. Sadzili AR, 7 Desember 2009.

¹¹⁹ Bernas, 24 Mei 1999, lihat lampiran-14, *Caleg PKB bagikan fot.*

¹²⁰ Wawancara dengan KH Mustamari, Sekretaris Pengurus Cabang NU Klaten tahun 1960-an pada 9 Mei 2009.

Majlis-majlis ilmu diadakan di tingkat desa-desa, seperti *Majlis Ijma'*, *Majlis Tahlil* dan *Majlis Dzikir*. Majlis ilmu tersebut sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1980-an, tetapi majelis-majelis itu banyak yang mati suri. Gerakan menghidupkan kembali majelis ilmu menjadi perintah langsung Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Klaten kepada pengurus struktural partai sampai di tingkat Ranting atau desa. Munculnya majlis-majlis ilmu dipelopori oleh para kiai, sehingga ketika kiai Ponpes masuk dalam majlis itu selalu mendapatkan tempat khusus, bahkan menjadi kehormatan tersendiri bagi para pengikut majlis itu. Figur kiai Ponpes adalah figur yang menjadi panutan bagi masyarakat NU, maka banyak putra putri warga NU sering disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan yang dikelola kiai di Ponpes. Lembaga pendidikan Ponpes ini mengelola sekolah mulai tingkat sekolah dasar (*Ibtidaiyah*), tingkat sekolah menengah pertama (*Tsanawiyah*) dan tingkat sekolah menengah atas (*Aliyah*).¹²¹

Figur seperti mantan Sekretaris Pengurus Cabang (PC) NU tahun 1960-an Kiai Mustamari sudah tidak diragukan lagi jasanya dalam pengembangan NU di Klaten. Nama Kiai Mustamari dengan sebutan *Mbah* Mustamari tidak hanya dikenal di daerah kelahirannya di Kecamatan Ngawen, tetapi *Mbah* Mustamari ini sudah dikenal di hampir semua kecamatan di Kabupaten Klaten. Keistimewaan *Mbah* Mustamari ini dimanfaatkan PKB untuk melakukan mobilisasi massa agar mendukung PKB dalam Pemilu 1999 di Klaten, karena perkataan *Mbah* Mustamari ini dianggap sebagai petuah bagi kalangan jemaah NU, bahkan di luar NU. Ajakan yang dilakukan *Mbah* Mustamari ini dilakukan secara informal dalam forum-forum

¹²¹ Wawancara dengan Drs. Syamsuddin Asyrofi, M.Hum, 24 September 2009.

tradisional keagamaan, seperti tasyakuran dan hajatan tradisi masyarakat Jawa lainnya. Berbicara sebagai sosok kiai sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam forum-forum tradisional tersebut lebih efektif daripada berbicara dalam kegiatan resmi keagamaan, seperti pengajian akbar, majelis ilmu dan sebagainya. Selain itu *Mbah* Mustamari juga sering menggunakan dalil-dalil agama sebagai legitimasi untuk meyakinkan masyarakat, bahwa visi misi PKB selaras dengan visi misi NU, karena PKB sebagai wadah politik NU pasca-*khittah*.¹²²

Saya menggerakkan massa di kelompok-kelompok masyarakat atas instruksi PKB, seperti di Desa Ketandan, saya berbicara dalam acara syukuran. Selain itu juga ada upaya mengumpulkan orang untuk diberikan pengarahan dan diberikan dalilnya. Dalil itu harus diucapkan dan dilaksanakan. *Al ilmanu ma'rifatul bil...* Yang penting di hatinya sudah mengatakan putih, ya wujudkan dalam wujud putih, jangan merah dan lain-lain. Saya sampai ke Kecamatan Juwiring dan Bayat juga bicara begitu. *Ditindakne nganggo barang sing putih alias jujur*.¹²³

Dalil-dalil politik lainnya, *Ashadiqu shadiq* (Membela yang benar) dan *Udkhulu fil Islami kaffah* (Masuklah Islam dengan sebenar-benarnya) sering digunakan dalam pengajian-pengajian. Sistem dakwah PKB yang diterapkan mirip dengan sistem dakwah NU di Kabupaten Klaten. Masing-masing kiai memiliki tugas penyebaran agama di wilayah-wilayah tertentu disesuaikan dengan Ponpes yang dipimpinnya. Meskipun dakwah yang dilakukan bisa lintas wilayah, namun metode dakwah PKB ini dilakukan secara sporadis dengan mengandalkan kiai Ponpes sesuai dengan jangkauan Ponpesnya.¹²⁴

¹²² Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009.

¹²³ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009.

¹²⁴ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009.

Dalam berdakwah mencari massa, para kiai Ponpes sudah memetakan wilayah-wilayah yang bisa menerima dirinya. Meskipun popularitas kiai sudah kuat, tetapi masih ada daerah yang tidak mau diajak untuk berpolitik. Kelompok-kelompok yang membedakan antara politik dan agama tidak menerima model kampanye melalui jalur keagamaan, apalagi menggunakan dalil-dalil agama. Pemetaan wilayah sudah dilakukan oleh DPC PKB Klaten dan disesuaikan dengan jadwal dari KPU dan kapasitas kiai. Dengan pemetaan wilayah itu, masing-masing kiai sudah mendapatkan jadwal kapan harus mengisi pengajian di daerah.

Kowe ojo ujuk-ujuk menyang desa sing ora dikenal, abang ijone ora ngerti, ngibadahe ya ora ngerti. Nek saiki arep ngleboke awakmu lan jiwamu nganggo dalil ulama. Ya lahire ya batine, lahire manut ulama, batine atine bener-bener iman marang Gusti-Allah, lisanmu ya padha ngandake mangkana.¹²⁵

Di kecamatan Ceper yang mempunyai basis massa yang besar dari PKB juga masih melibatkan Kiai NU dan MWC NU dalam membantu memobilisasi massa. Hal tersebut dilakukan karena PAC PKB Ceper merasa yakin bahwa figur seorang Kiai sangat berpengaruh dalam hal ini. Figur seorang Kiai di anggap mampu menarik perhatian dan minat masyarakat, khususnya warga NU untuk menyalurkan aspirasinya terhadap PKB. Terbukti pada Pemilu 1999 perolehan suara PKB di Ceper paling tinggi di antara Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Klaten yaitu 5.148.¹²⁶

Berdasarkan tabel 6, PKB pada Pemilu 1999 mampu masuk 5 besar dalam perolehan suaranya di Kabupaten Klaten. PKB yang merupakan partai baru di Klaten

¹²⁵ Wawancara dengan KH Mustamari, 9 Mei 2009.

¹²⁶ Wawancara dengan M. Sadzili AR, 7 Desember 2008

mampu menduduki peringkat keempat dibandingkan dengan PPP yang sebelumnya menjadi wadah aspirasi sebagian warga NU dan juga bila dibandingkan dengan Partai yang *notabene* NU lainnya. Hal itu merupakan sebuah kesuksesan utama yang mampu diraih PKB.

Tabel 6
Perolehan Suara Kumulatif 5 Partai Besar Hasil Pemilu 1999
Di Kabupaten Klaten

No	Nama Partai	Suara	%
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	383.820	55,24%
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	92.938	13,42%
3.	Partai Golkar	82.311	11,89%
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	39.925	5,77%
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	34.879	5,04%

Sumber : Arsip Kantor DPC PKB Kabupaten Klaten, Tahun 1999.

C. Konsolidasi NU – PKB di Klaten

Komitmen antara NU dan PKB di Klaten sudah terbangun sejak awal berdirinya PKB pada tahun 1998, karena pendirian PKB sendiri dilatar belakangi oleh NU. Hubungan antara NU dengan PKB di Klaten pada masa Pemilu 1999 seperti hubungan bapak dan anak. NU senantiasa membantu PKB dalam menghadapi Pemilu 1999, dari awal hingga akhir dalam tahapan Pemilu. Konsolidasi yang dilakukan NU – PKB adalah untuk menentukan pembagian tugas dalam hal sosialisasi ke daerah Kecamatan dan desa yang ada di Klaten.¹²⁷

¹²⁷ Lihat lampiran-3 tentang rencana pembagian tugas PCNU Klaten.

Konsolidasi PKB dilakukan di masing-masing kecamatan, karena model pemilihannya dilakukan bukan menggunakan sistem Dapil murni, melainkan masih mengadopsi sistem *distrik*, sehingga fokus garapan dalam mendukung PKB di Klaten lebih diprioritaskan pada strategi penggalangan massa di tingkat PAC dan Pimpinan Ranting (PR). Pengurus NU di tingkat kecamatan atau MWC *mem-backup* setiap kegiatan yang dilakukan di tingkat PAC. Dengan model seperti itu para Caleg dari PKB di Klaten tidak begitu berat untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye di tingkat PAC dan PR, karena sebelumnya sudah di kondisikan dengan adanya konsolidasi NU – PKB Klaten.

PKB di Klaten untuk menjadi Caleg DPRD dari PKB tidak mudah, bukan hanya bermodal uang, keinginan dan sebagainya melainkan yang utama adalah harus mendapatkan restu dari Kiai yang tidak lain adalah pengurus NU. Meminta restu kepada kiai bukan sekedar kiai tapi kiai tertentu yang memiliki kharisma yang paling tinggi diantara kiai-kiai yang lain, karena restu kiai tersebut akan menjadi ukuran seorang Caleg akan terpilih atau tidak menjadi anggota legislatif di Kabupaten Klaten. Bukan karena kiai tersebut memiliki kekuatan supranatural yang tinggi, tetapi secara logika seorang kiai yang diyakini masyarakat Klaten sebagai kiai sepuh, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi, otomatis berpengaruh pada perilaku pemilih dalam memilih wakilnya untuk menjadi anggota legislatif. Di Klaten Kiai yang dimintai apa waktu itu adalah KH. Salman Dahlawi (*mbah Salman*), Pengasuh Ponpes Al-Manshur Popongan, Wonosari, Klaten.¹²⁸ Seperti halnya yang terjadi menjelang Pemilu 1992 di Klaten, saat Drs Bambang Suprobo di minta dari

¹²⁸ Wawancara dengan Drs. H. Bambang Suprobo, M.Si, 28 Februari 2008.

PPP untuk menjadi anggota legislatif, beliau belum bisa memberikan jawabannya jika belum mendapat restu dari Kiai Salman. Maka dari itu beliau langsung sowan *Mbah* Salman. Dalam cerita singkatnya Drs. Bambang Suprobo menyatakan;

Setelah sowan *mbah* Salman saya diminta untuk sholat istikharah, dan saya menjalankannya. Satu pekan kemudian saya di saya *ditimbali*, waktu itu pada hari Selasa, *ba'da* Ashar, dan saya menunggu sampai habis waku Maghrib.

Kiai Salman : *Pak Probo sampun angsal ngalamat?*

Saya : *Dereng kiai*

Kiai Salman : *Kula sampun*

Saya : *Lha dos pundi Kiai?*

Kiai Salman : *Wis ora usah dilanjutke, ngurusi NU wae. Ngalamate mau, Kula siram neng ngarep masjid dioyak-oyak wong loro. Nanging sing ngoyak-ngoyak iku ora katon.*¹²⁹

Pesan dari Kiai Salman dijadikan dasar Pak Probo untuk tidak bersedia dicalonkan dari PPP, dan tetap mengurus NU Klaten, karena saat itu masih menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Penu Klaten periode 1992-1997.

Berbeda pada saat Pemilu 1999, Pak Probo yang ingin menyalonkan diri menjadi anggota legislatif di DPRD Klaten, beliau tidak perlu melakukan sholat istikharah lagi, karena sudah direstui oleh Kiai Salman. Dan terbukti Drs. Bambang Suprobo memperoleh suara urutan pertama di Daerah Pemilihan (Dapil) IV : Delanggu, Juwiring, Ceper, Wonosari. Bahkan menjadi Wakil Ketua DPRD II di Klaten.¹³⁰ Hal ini juga menjadi salah satu sejarah kesuksesan PKB di Klaten.

¹²⁹ Wawancara dengan Drs. H. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009.

¹³⁰ Wawancara dengan Drs. H. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009.

D. Hasil Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten

Dalam waktu kurang dari satu tahun pasca pembentukan partai baru, PKB mampu membentuk pimpinan anak cabang (PAC) di 26 kecamatan, sedangkan pembentukan sebanyak 11 ranting membutuhkan waktu 11 bulan yang sudah berdekatan dengan masa kampanye. Menjelang masa kampanye dimulai struktural PKB belum siap keseluruhan sampai basis desa/kelurahan. Dari ratusan desa di Kabupaten Klaten, PKB baru menempatkan struktur di 11 desa. Sebagaimana komitmen NU pada awal pendirian PKB, struktural NU di tingkat kecamatan membantu pembentukan struktural PKB di tingkat ranting. Pendirian ranting NU tingkat desa juga berimbas pada pembentukan struktural ranting PKB, sehingga dalam waktu singkat sebanyak 90-100 ranting PKB bisa terbentuk, meskipun belum maksimal. Dukungan NU kepada PKB tidak diberikan secara transparan, karena adanya *khittah* 1926 yang mendasari NU untuk tidak berpolitik praktis dan untuk menghindari adanya image negatif bagi NU. Sejumlah Caleg PKB dijarang melalui majelis-majelis PKB di daerah kecamatan, sebagian besar memang memiliki loyalitas tinggi kepada PKB dan NU.¹³¹

1. Proses Pemilihan

Proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Daerah (PPD) II pada prinsipnya tidak terjadi permasalahan yang serius. Meskipun pada masa kampanye sempat terjadi benturan fisik antarpemungutan partai politik, namun konflik antarpemungutan peserta pemilu tersebut

¹³¹ Wawancara dengan Drs. H. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009.

tidak sampai berimbas pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Dalam proses Pemilu di Kabupaten Klaten, PPD II dibantu oleh petugas di 26 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan 401 panitia pemungutan suara (PPS) dengan membutuhkan sebanyak 2.013 tempat pemungutan suara (TPS).¹³²

Permasalahan yang terjadi justru berkaitan dengan perubahan jadwal tahapan Pemilu dari KPU, sehingga berdampak pada perubahan proses pelaksanaan tahapan Pemilu di Klaten. Peraturan KPU Nomor 11/1990 tentang Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu 1999 ternyata banyak berubah, padahal baru berjalan tujuh hari. Setelah menerbitkan peraturan KPU Nomor 11/1999 tertanggal 22 April 1999, KPU kembali menerbitkan peraturan baru Nomor 53/1999 tertanggal 28 April 1999 tentang adanya perubahan pada tahapan pendaftaran pemilih yang diperpanjang 16 hari dari jadwal semula dan perubahan tahapan pencalonan anggota DPRD Klaten. Setelah berjalan delapan hari KPU menerbitkan lagi peraturan baru, yaitu Peraturan KPU Nomor 67/1999. Peraturan KPU itu memperpanjang lagi tahapan pendaftaran pemilih, yang semula dari 13 April-4 Mei 1999 diubah menjadi 13 April-15 Mei 1999. Perubahan tersebut juga berdampak pada jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT), yang semula dijadwalkan pada 13 Mei 1999 menjadi 18 Mei 1999. Perubahan-perubahan jadwal itu juga mempengaruhi jadwal pelaksanaan Pemilu, di mana porsi waktu yang dijadwalkan juga diperpanjang dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 134/1999 tertanggal 15 Juli 1999. Peraturan tersebut

¹³² Komisi Pemilihan Umum, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah*, Jilid II, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah, 1999, hlm 145. Lihat lampiran-7 tentang sertifikat tabulasi hasil pemungutan suara PPD tingkat II.

mengubah tahapan pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, penetapan dan pemberitahuan kepada calon terpilih serta pengucapan sumpah janji.¹³³

Dengan banyaknya perubahan atas jadwal tahapan Pemilu tersebut, KPU tetap tidak mengubah jadwal pelaksanaan pemungutan suara, yakni tetap dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Tetapi proses penghitungan suara hasil pemungutan suara yang diperpanjang tidak hanya sampai 21 Juni 1999 seperti yang dijadwalkan semula, melainkan diperpanjang sampai 6 Juli 1999. Proses penghitungan mulai dari TPS, PPK hingga PPD II Klaten memakan waktu sampai lebih dari satu pekan.¹³⁴ Dari tabulasi hasil penghitungan suara PPD tingkat II Kabupaten Klaten, jumlah suara sah mencapai 692.530 suara dari total surat suara sebanyak sebanyak 771.079 lembar. Sisanya sebanyak 14.412 suara dinyatakan tidak sah, sedangkan jumlah suara rusak dan dikembalikan sebanyak 2.867 lembar serta sebanyak 61.270 surat suara tidak terpakai.¹³⁵

2. Penentuan Calon Terpilih

Berdasarkan tabulasi hasil penghitungan, PPD II¹³⁶ Klaten bisa menentukan perolehan kursi dari 48 partai peserta Pemilu dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebagai acuannya. Untuk menentukan berapa partai yang mendapatkan alokasi kursi di DPRD Klaten, PPD II harus menentukan besaran BPP. Penentuan BPP tersebut ditentukan dengan rumus jumlah suara sah hasil pemungutan suara dibagi dengan jumlah kursi di DPRD Klaten. Berdasarkan Keputusan KPU, jumlah

¹³³ Ibid, hlm 1-12.

¹³⁴ Ibid, hlm 5-11.

¹³⁵ Ibid, hlm 145.

¹³⁶ Hak dan wewenang PPD II diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Pasal 67 juncto Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 3/1999. Lihat juga KPU, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999*, 1999, hlm385-474.

kursi untuk DPRD di Kabupaten Klaten sebanyak 45 kursi, yang terbagi atas 40 kursi dipilih dan 5 kursi diangkat. Keputusan tersebut mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 1999 sebanyak 1.102.700 jiwa.¹³⁷ Jumlah perolehan suara sah sebanyak 692.530 suara dibagi 40 kursi di DPRD Klaten, sehingga diperoleh BPP sebesar 17.313.¹³⁸

Tabel 7
Perolehan suara 10 besar pada Pemilu 1999
Di Kabupaten Klaten

No	Nama Partai	DPR	DPRD I	DPRD II
1.	PDIP	387.234	385721	383.820
2.	PAN	94.295	93.124	92.938
3.	Partai Golkar	83.145	82.681	82.311
4.	PKB	39.485	39.943	39.925
5.	PPP	34.360	34.524	34.879
6.	Partai Keadilan	8.676	8.937	8.881
7.	Partai Bulan Bintang	7.578	7.351	7.184
8.	PNI Front Marhaenis	4.079	3.987	3.990
9.	Partai KAMI	3.312	3.277	3.247
10.	PNI	3.274	3.285	3.406

Sumber : *Harian Solopos*, 17 Juni 1999, dan dari pengolahan data tabulasi hasil penghitungan suara PPD Tingkat II Kabupaten Klaten, Komisi Pemilihan Umum, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah*, Jilid II, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah, 1999 hlm 145-146.

¹³⁷ KPU, *Pemilu 1999 Dalam Angka*, 1999, hlm 50.

¹³⁸ Rumus penentuan kursi DPRD diatur dalam Peraturan KPU Nomor 76.A Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. Lihat Ibid hlm 629-638. Lihat juga dalam Keputusan KPU Nomor 136/1999, Keputusan KPU Nomor 42/1999 juncto Keputusan KPU Nomor 82/1999. Lihat lampiran-10.

Berdasarkan tabel 7 diatas setelah ditentukan jumlah BPP, maka PPD II baru menghitung perolehan kursi partai politik berdasarkan pada perolehan suara masing-masing partai politik peserta Pemilu. Hasil perolehan suara 48 partai politik menunjukkan PDIP partai nomor urut 11 menduduki peringkat pertama suara terbanyak dengan mengantongi 383.820 suara untuk DPRD II di Kabupatem Klaten. PAN partai nomor urut 15 menyusul di urutan kedua dengan mendapatkan sebanyak 92.938 suara. Partai Golkar dengan nomor urut partai ke-33 berada di peringkat ketiga dengan perolehan 82.311 suara. PKB dengan nomor urut 35 menduduki peringkat keempat dengan memiliki 39.925 suara, sedangkan PPP dengan nomor urut 9 berada di bawah PKB, karena hanya memiliki 34.879 suara.¹³⁹

Dari perolehan suara 10 besar partai terbesar dalam tabel 7, hanya 7 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Klaten. Dalam penghitungan kursi tahap pertama, yakni membagi perolehan suara partai dengan BPP sampai habis, PDIP mendapatkan 22 kursi namun sisa suara kecil, disusul PAN dengan 5 kursi plus sisa suara gemuk, Partai Golkar dengan 4 kursi plus sisa suara gemuk capai 13.059 suara, PKB dengan 2 kursi plus sisa suara gemuk dan PPP dengan 2 kursi dengan sisa suara kecil hanya 253 suara. Berdasarkan perhitungan tahap pertama diperoleh sebanyak 35 kursi, sehingga masih sisa sebanyak 5 kursi kosong.

Untuk menentukan partai mana yang berhak mendapatkan 5 kursi tersebut, PPD II melakukan mekanisme perhitungan tahap kedua, yakni dengan membandingkan sisa suara 5 partai tersebut dengan perolehan suara partai lainnya

¹³⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah*, Jilid II, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah, 1999, hlm 146.

yang tidak mencapai BPP. Perhitungan tahap kedua ini menghasilkan perolehan kursi terdiri atas, Partai Golkar mendapatkan 1 kursi tambahan dengan perolehan sisa suara 13.059 suara, Partai Keadilan (PK) mendapatkan 1 kursi dengan perolehan suara 8.881 suara, Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan 1 kursi dengan 7.184 suara, PAN mendapatkan tambahan 1 kursi karena memiliki 6.373 suara dan PKB juga mendapatkan 1 kursi tambahan dengan 5.295 suara. Dengan demikian sebanyak 40 kursi yang dipilih sudah habis terbagi kepada 7 partai politik peserta Pemilu.¹⁴⁰ Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8
Pembagian Kursi dan Persentase Hasil Pemilu 1999
Di Kabupaten Klaten

No	Nama Partai	DPRD II	Kursi	Persentase
1.	PDIP	383.820	22 kursi	55,43%
2.	PAN	92.938	6 kursi	13,42%
3.	Partai Golkar	82.311	5 kursi	11,89%
4.	PKB	39.925	3 kursi	5,77%
5.	PPP	34.879	2 kursi	5,04%
6.	Partai Keadilan	8.881	1 kursi	1,28%
7.	Partai Bulan Bintang	7.184	1 kursi	1,04%

Sumber : Dari pengolahan data tabulasi hasil penghitungan suara PPD Tingkat II Kabupaten Klaten, yang mengacu pada Keputusan KPU Nomor 136/1999.

Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 136/1999, mekanisme penentuan anggota DPRD terpilih diserahkan sepenuhnya kepada

¹⁴⁰ Penghitungan perolehan kursi masing-masing partai tersebut didasarkan pada aturan main dalam Keputusan KPU Nomor 136/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II Pemilu Tahun 1999.

pimpinan daerah tingkat II partai politik yang bersangkutan berdasarkan nomor urut calon anggota legislatif (Caleg) dalam DCT dan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Pimpinan partai politik tingkat II menentukan nama Caleg dari kecamatan yang memperoleh suara terbanyaknya dibandingkan kecamatan lainnya. Sedangkan untuk penentuan 5 anggota DPRD lainnya yang diangkat tanpa pemilihan sudah ditentukan dengan keputusan pimpinan ABRI.¹⁴¹

3. Pendulang Suara PKB

Pesaing paling kuat dalam perjuangan PKB dalam meraih kursi di DPRD Klaten adalah dari PDIP dan PAN. Partai Golkar yang berjaya pada masa Orde Baru tidak terlalu berat persaingannya, karena sebagian warga NU ada di partai berlambang pohon beringin itu. PKB jarang berbenturan dengan Partai Golkar, justru benturan yang terjadi dengan PAN, PPP dan PDIP, meskipun tidak muncul di permukaan. Basis PKB di Klaten hanya mengandalkan massa dari NU, basis-basis lain sebagai realisasi inklusivitas PKB tidak mampu terealisasi secara maksimal.

Pendukung PKB di Klaten yang diprediksi semula sebanyak 46.000 orang menyebar di 26 wilayah kecamatan. Dengan kekuatan tersebut PKB hanya mendapatkan tiga kursi dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Karangnongko, Ceper dan Jogonalan.¹⁴² Realisasi perolehan suara PKB pada Pemilu 1999 ternyata berada di luar prediksi, yakni sebanyak 39.925 suara atau 5,77% dari total suara yang ada. PPP yang memiliki basis massa NU mengalami penurunan dratis. Hasil Pemilu 1997, PPP mampu meraih 11 kursi di DPRD Klaten, namun hasil Pemilu 1999 jumlah kursi

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Wawancara dengan Drs. H. Bambang Suprobo, 28 Februari 2009.

PPP tinggal dua kursi. Selain sebagian besar massa lari ke PKB, massa PPP juga banyak yang menyeberang ke PK dan PAN.¹⁴³

Kontribusi keberhasilan PKB sebagai partai peringkat keempat dalam Pemilu tahun 1999 setelah PDIP, PAN dan Partai Golkar berasal dari enam kecamatan yang memiliki perolehan suara di atas 2.000 suara. Keenam kecamatan itu terdiri atas Kecamatan Ceper, Karangnongko, Karanganom, Ngawen, Manisrenggo dan Kemalang. Sebanyak 20 kecamatan lainnya hanya mendapatkan perolehan suara di bawah 1.600 suara kecuali Kecamatan Klaten Tengah. PKB tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari kecamatan tersebut. Massa pendukung NU di Kecamatan Klaten Tengah diperkirakan lari ke PDIP, PAN, Partai Golkar atau ke PPP. Keenam kecamatan tersebut merupakan basis kekuatan PKB, karena sejumlah Ponpes dan kiai Ponpes di enam kecamatan tersebut mendukung serius perjuangan PKB, terutama di Kecamatan Ceper yang mampu memberikan kontribusi suara sampai 5.148 suara, Kecamatan Karangnongko sebanyak 4.859 suara dan Kecamatan Karanganom dengan perolehan suara sebanyak 2.935 suara.¹⁴⁴

Selain ketiga kecamatan di atas, peranan kiai dalam kampanye PKB cukup efektif di tiga kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Ngawen, Manisrenggo dan Karangmalang. Perolehan suara PKB di lima kecamatan berada di peringkat tiga besar dengan persaingan ketat dengan PAN dan Partai Golkar. Seperti di Kecamatan Ngawen, PKB mampu menggoyang Partai Golkar, meskipun harus kalah dengan PPP. Demikian pula di Kecamatan Manisrenggo, PKB mampu duduk di peringkat

¹⁴³ SOLOPOS, 17 Juni 1999.

¹⁴⁴ DPC PKB Klaten, Hasil perolehan suara per kecamatan, 1999.

kedua setelah PDIP dalam perolehan suara terbanyak. Fenomena kekuatan PKB di Kecamatan Ngawen juga terjadi di Kecamatan Karangmalang dan Karangnongko cukup dominan dan mampu menumbangkan PAN dan Partai Golkar, apalagi PPP. Sementara di Kecamatan Ceper, tempat dilahirkan PKB justru hanya menduduki peringkat ketiga setelah PDIP dan PAN, karena kekuatan PAN di Ceper sangat dominan, sehingga PKB dan PAN hanya selisih 140 suara, PAN mendapatkan 5.288 suara sedangkan PKB mendapatkan 5.148 suara.¹⁴⁵

Suara PKB yang konsisten berada di peringkat keempat berada di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Wedi, Kebonarum, Prambanan, Gantiwarno, Jogonalan, Karangnom, dan Delanggu. Sedangkan 14 kecamatan lainnya berada di bawah PPP, bahkan PKB tidak memiliki pendukung di Kecamatan Klaten Tengah. Sebagian besar warga NU larinya ke Partai Golkar, PPP dan PDIP, karena 14 kecamatan tersebut rata-rata merupakan daerah dengan tingkat perekonomian yang mapan di perkotaan. Sebagian pemilih lebih cenderung ke Partai Golkar, karena pemilih didominasi pegawai negeri sipil (PNS) dan abangan. Dahwah dan kampanye kiai pesantren tidak mampu menembus lapisan masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan demikian kualitas dakwah dan kampanye kiai pesantren lebih berhasil di daerah pedesaan dengan tingkat pemahaman keagamaan kurang dan hubungan primordialnya kuat.

¹⁴⁵ Pusat Data dan Dokumentasi DPC PKB Kabupaten Klaten tahun 1999.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan kiai di tingkat Pengurus Besar (PB) NU selalu membawa implikasi secara struktural kelembagaan di tingkat daerah, termasuk keputusan para kiai untuk mendirikan partai baru juga berimbas pada kiai pendirian partai baru di daerah, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lahirnya NU dan PKB di Kabupaten Klaten tidak bisa lepas dari peranan Kiai Pesantren, karena pendirian NU dan PKB di Klaten dipelopori dan direstui oleh beberapa kiai pesantren yang ada di Klaten, tanpa restu dari pesantren maka kedua organisasi tersebut tidak mungkin ada di Klaten. Pada Pemilu 1999 PKB merupakan partai baru yang berusia sekitar 10 Bulan. Jadi merupakan tugas bagi NU di Klaten untuk membimbing PKB, baik dalam pembentukan PAC maupun dalam memobilisasi massa.

Pola kaderisasi dalam penggalangan massa untuk mencapai tujuan politik PKB di Klaten pada Pemilu 1999 sedikit banyak dibantu oleh para kiai dari NU. Bisa dikatakan bahwa antara PKB dan NU ini ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Pola-pola gerakan politik PKB Klaten hampir selalu melibatkan sejumlah tokoh NU dan Kiai pesantren di tingkat Pimpinan Anak cabang (PAC) sampai ke Pimpinan Ranting. Gerakan politik yang dilakukan sejumlah kiai NU untuk mensukseskan PKB Klaten sifatnya tradisional dan konservatif. Mereka memanfaatkan kelompok-kelompok pengajian kampung atau desa untuk menyampaikan tentang visi misi PKB,

keunggulan dan kelebihan PKB. Dalam penyampaian tentang PKB didalam pengajian – pengajian tersebut Kiai menghimbau kepada warganya untuk menyalurkan aspirasinya kepada PKB. Tetapi juga tetap menegaskan bahwa NU dan PKB di Klaten tidak memaksakan kehendak warganya dalam menyalurkan aspirasinya. Mereka tetap di beri kebebasan untuk memilih menurut hati nurani masing – masing.

PKB Kabupaten Klaten upayanya dalam memobilisasi massa lebih mengedepankan peran figur politisi yaitu kiai pesantren yang dianggap memiliki otoritas untuk memobilisasi massa daripada menjual sosok partai yang memiliki visi ke depan. Keterlibatan kiai pondok pesantren (Ponpes) Klaten tersebut sangat berpengaruh, karena figur kiai ini dalam memobilisasi massa biasanya menggunakan dalil-dalil politik sebagai legitimasi untuk meyakinkan masyarakat. Sehingga warga yang senantiasa berkhidmat terhadap kiai maka pasti akan mengikuti semua apa yang sudah difatwakan oleh kiai tersebut. Fatwa seorang kiai yang menghimbau kepada masyarakat khususnya NU, biasanya dikeluarkan ketika beliau memang dalam tugas pensosialisasian atau kampanye. Sedangkan ketika beliau tidak dalam tugas kampanye maka tidak menyampaikannya, hanya sebatas mengajar keagamaan. Jadi memang tidak mencampuradukkan masalah keagamaan dengan masalah politik, agar nama baik seorang kiai juga tidak tercoreng.

Selain dengan mengedepankan figur seorang kiai, PKB Klaten juga masih melibatkan beberapa pengurus NU dalam mensosialisasikan PKB dan memobilisasi massa. Karena NU yang lebih tahu wilayah – wilayah yang dapat menjadi basis massa bagi PKB. Yang dilakukan NU adalah membuat daftar beberapa tokoh – tokoh NU se-Kabupaten Klaten, kemudian mengunjungi mereka, dan menghimbau untuk

menyalurkan aspirasinya kepada PKB di Klaten dan membantu dalam memobilisasi massa. Sedangkan cara berkampanye yang dilakukan para Caleg PKB Klaten sendiri juga hampir sama yaitu dengan langsung Turba ke PAC dan Pimpinan Ranting, bedanya hanya para Caleg pada saat kampanye membagikan gambar PKB dan foto Caleg tersebut. Hal tersebut diharapkan mampu menarik minat warga NU dan PKB sebanyak – banyaknya.

Dari cara dan model berkampanye tersebut PKB Klaten mampu menjadi partai pemenang keempat setelah PDIP, PAN dan Partai Golkar dalam Pemilu 1999 di Klaten, satu tingkat diatas PPP. Hal tersebut merupakan sebuah kesuksesan utama yang mampu di raih PKB dengan dukungan dari NU dan Kiai NU di Klaten.

Kesuksesan lainnya yang diraih dari PKB pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten antara lain: suksesnya dalam menata kader PKB sampai ke tingkat TPS, suksesnya penyelenggaraan kampanye PKB Klaten, suksesnya menghindari konflik baik *intern* maupun *ekstern* selama masa kampanye, suksesnya para simpatisan PKB tidak melakukan pelanggaran dan kecurangan, serta suksesnya perolehan suara PKB Klaten masuk dalam 5 besar urutan keempat, lebih tinggi daripada PPP dan Partai yang *notabene* NU lainnya. Kemudian kesuksesan yang diraih salah satu Calon anggota legislatif dari Ceper yang merupakan basis massa PKB terbesar di Klaten adalah Drs. H. Bambang Suprobo, M. Si mampu memperoleh urutan suara pertama dan menjadi wakil ketua DPRD II di Kabupaten Klaten.

Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesuksesan – kesuksesan yang diraih PKB merupakan hasil dan wujud dari perjuangan NU dan para Kiai Pesantren

di Klaten, yang mana sebagian warga NU yang benar – benar patuh pada kiai tetap mengikuti apa yang di fatwakan oleh kiai yaitu PKB.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, 2006, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdurrahman Wahid KH, 1998, sambutan yang disampaikan dalam Deklarasi PKB tanggal 23 Juli 1998, dalam Warta NU, Edisi Agustus.
- Ali Maschan Moesa, 1999, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya : Lepkiss.
- Arbi Sanit, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I April.
- Asnawi A, 2003, *Max Weber Sebuah Khazanah*, Yogyakarta : Ikon Teralitera, Cetakan I, April.
- Badan Pusat Statistik, 2000, *Klaten Dalam Angka 1999*, Klaten: BPS-Bappeda Kabupaten Klaten.
- Bagian Ortakala Sekretariat Daerah (Setda), *Klaten dari Masa ke Masa*, Kabupaten Dati II Klaten Tahun 1992/1993.
- Dennis Wrong (Ed), 1970, *Max Weber—Makers of Modern Social Sciens (Series)*, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall
- DPC PKB Klaten, 1999, Hasil perolehan suara per kecamatan
- Effendy A Choirie, 2002, *PKB Politik Jalan Tengah NU; Ejkspemen Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan pascakembali ke Khittah 1926*, Jakarta : Pustaka Ciganjur.
- Einar M Sitompul, 1989, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Feillard, Andree, 1999, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta : LKIS.
- Geertz, Clifford, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hairus Salim HS, dkk, 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta : LKiS, 1 Mei.

- Hussein Syifa, *Menggagas Model berpolitik NU yang relevan Bagi Masa Depan Santri*, 2004
- Imam Tholkhah, 2003, *Anatomi Konflik Politik Indonesia, Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan II.
- Kacung Marijan, 1999, “Ketika PKB Ingin Menjadi Partai Besar” dalam Hairus Salim HS, dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta : LkiS.
- Kerstien, Thom, 1996, *The New Elite in Asia and Africa: A Comparative Study of Indonesia and Ghana*, New York: Frederick A, Praeger Publisher.
- Kevin R Evans, 2000, *Sistem Baru, Suasana Baru Pemilu 1999 yang Dinanti Dalam Almanak Parpol Indonesia : Pemilu 1999*, Jakarta : API
- Kevin R Evans, 2003, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta Selatan, PT Arise Consultancies.
- Khoirudin, 2005, *Menuju Partai Advokasi*, Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa.
- Kholid Novianto, al Chaidar (ed), 1999, *Era Baru Indonesia : Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Nur Mahmudi, Matori Abdul Djalil dan Yusril Ihza Mahendra*, Cetakan I, Jakarta : pt raja grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 1983, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999*.
- Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Tengah*, Jilid II, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah.
- Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Pemilu 1999 Dalam Angka*.
- Komisi Pemilihan Umum, 1999, *Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu Tahun 1999*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sartono Kartodirjo, 1981, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : LP3ES Thom Kerstien, 1966, *The New Elite in Asia and Africa: A Comparative Study of Indonesia and Ghana*, New York : Frederick A, Praeger Publisher.

Sri Edi Swasono, 2001, *Reformasi Menjadi Deformasi, dari Lengseng ke Lengser*, Jakarta : UI Press.

Zamarkhsyari Dhofier, 1983, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES.

Media cetak

Kompas, 5 April 1999.

Kompas, 9 Mei 1994.

Forum Keadilan, 12 April 1999.

SOLOPOS, 17 Juni 1999.

Bernas, 7 Mei 1999.

Bernas, 8 Mei 1999.

Bernas, 24 Mei 1999.

Bernas, 31 Mei 1999.

Bernas, 3 Juni 1999.

.